LAMPIRAN

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

Lampiran 1 Jadwal Penelitian

No	KEGIATAN	JADWAL PENELITIAN (2022)																							
		MARET				APRIL				MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul dan Konsep Penelitian																								
2	Penyusunan Pra Proposal																								
3	Penyusunan Proposal bab 1-3																								
4	Revisi proposal																								
5	Seminar Proposal																								
6	Revisi proposal pasca seminar																								
7	pengajuan surat Penelitian																								
8	Pengumpulan Data dan Analisis Data																								
9	Penyusunan Naskah Skripsi																								
10	Ujian Skripsi																								
11	Revisi Pasca Ujian Skripsi																								
12	Pembukuan Skripsi																								

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA
PERPUSTAKAAN

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian

YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA
FAKULTAS EKONOMI DAN SOSIAL
Jl. Siliwangi, Ring Road Barat, Gamping, Yogyakarta 55293
Telp. (0274) 552489, 552851 Fax. (0274) 557228 Website: www.unjaya.ac.id E-mail: info@unjaya.ac.id

Yogyakarta, 27 Mei 2022

Nomor : B/09/FES/ V /2022
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada
Yth. Bapak/Ibu Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Yogyakarta
di –
tempat

1. Dasar
   a. Surat Keputusan Rektor Unjaya Nomor: Skep/051/UNJAYA/IX/2021 tanggal 24 Juni 2021 Tentang Kalender Akademik Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta Tahun Akademik 2021/2022.
   b. Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Sosial Unjani Yogyakarta nomor : Skep/001/FES/II/2021 tentang Panduan Pembimbingan Skripsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas dan dalam rangka memenuhi persyaratan Tugas Akhir/Skripsi mohon kiranya Bapak/Ibu **Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta** berkenan menerima mahasiswa kami untuk melaksanakan **Penelitian** di Kantor yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun data Mahasiswa kami ~~adalah~~ sebagai berikut :

Nama Mahasiswa	:	Muhammad Choirul Anam
NPM	:	182301019
Program Studi	:	Akuntansi (S-1)
No.Telephone	:	087737800827
Email	:	anamchoirul1145@gmail.com
Judul Skripsi	:	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) di Kota Yogyakarta
Pembimbing Skripsi	:	David Sulistiyantoro, S.E., M.Acc., Ak., CA.

3. Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

a.n Dekan FES Unjaya
Wakil Dekan I

Adi Heryadi, S.Psi., M.Psi., Psikolog.
NPP. 2019 13 0143

Tembusan :
1. Ketua Prodi Akuntansi (S-1) FES Unjaya.

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165
Telp. (0274) 548519, 562835, 515865, 562682 Fax (0274) 548519
EMAIL: bpkad@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 070 / 3679

Yang bertanda tangan di bawah ini
Nama : Wasesa, SH
NIP. : 196405061993031009
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama Mahasiswa : Muhammad Choirul Anam
NPM : 182301019
Mahasiswa : Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

telah mengadakan penelitian/riset dan wawancara di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan skripsi yang berjudul " Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Yogyakarta" .

Demikian untuk menjadikan periksa, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 28 Juni 2022

Kepala

WASESA, SH
NIP. 196405061993031009

SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA
PERPUSTAKAAN

Lampiran 4 Surat Permohonan Keberatan Wajib Pajak

[redacted]

Jakarta, 10 Februari 2022

Nomor : [redacted]
Sifat : Terbatas
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Kebijakan Terkait Pembayaran Kekurangan Pajak Parkir [redacted] Periode Tahun 2016 s.d 2017

[redacted]

Kepada Yth

Walikota Yogyakarta

di
Tempat

Dengan Hormat,

1. Menunjuk Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Parkir Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor [redacted]P.Pkr/LHP/YK/21/2022 Tgl 21 Januari 2022 dengan Nama Objek Pajak [redacted], NPWPD [redacted] Periode Masa Pajak Januari 2016 s.d Desember 2017.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mengingat kondisi keuangan kami masih belum pulih akibat terdampak Covid -19, dengan ini kami mohon kebijaksanaan Bapak Walikota Untuk dapat Menghapuskan denda/sanksi administrasi yang timbul sebagaimana yang tertera didalam laporan Hasil data pemeriksaan diatas.
3. Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya dan persetujuannya di ucapkan terima kasih.

Pit. Director of Operation,

[redacted]

Tembusan Internal:

Manager Parking Planning, Operation, and Evaluation [redacted]
Manager Parking Development Corporate Office [redacted]
Branch Manager 5 Yogyakarta [redacted]
JM Parking Operation | ENDRI [redacted]
Junior Manager Administration | [redacted]
Assistan Manager Parking [redacted]

Tembusan Eksternal

Kepala BPKAD Kota Yogyakarta

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA
PERPUSTAKAAN

Lampiran 5 Pedoman wawancara

Pedoman Wawancara Kepada Pejabat Subbidang Penagihan dan Keberatan Pajak Daerah:

1. Bagaimana proses penagihan pajak daerah pada subbidang penagihan dan keberatan BPKAD Kota Yogyakarta?
2. Apakah ada perlawanan dari WP saat proses penagihan?
3. Apakah dari SOP yang berlaku sekarang mampu meningkatkan realisasasi penerimaan pajak khususnya pajak parkir?

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

Lampiran 6 Identitas, Foto Surat Persetujuan dan Foto Hasil Membercheck Informan Penelitian

1. Informan 1

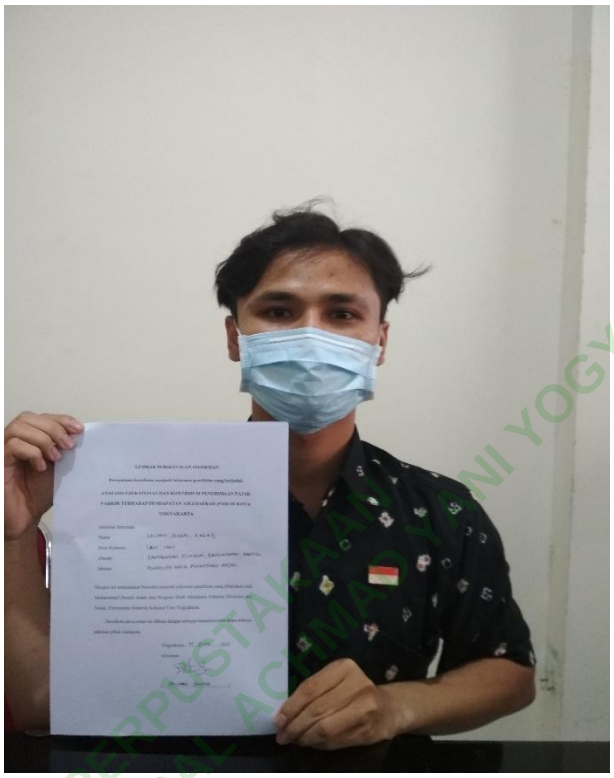

Nama : Salomo Saragi, A.Md.A.Pj.

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Sanggrahan Plombon, Banguntapan, Bantul.

Jabatan : Pengolahan Data Penagihan Pajak

Kode : I1

Foto Persetujuan dan pernyataan hasil *membercheck* dari Informan Penelitian:

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA
PERPUSTAKAAN

1. Foto Pernyataan Persetujuan menjadi informan:

LEMBAR PERSETUJUAN INFORMAN

Pernyataan kesediaan menjadi informan penelitian yang berjudul:

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA YOGYAKARTA

Identitas Informan

Nama : SALOMO SARAGI, A.Md.A.Pj.

Jenis Kelamin : LAKI - LAKI

Alamat : SANGGRAHAN PLUMBON, BANGUNTAPAN, BANTUL

Jabatan : PENGOLAH DATA PENAGIHAN PAJAK

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi informan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Choirul Anam dari Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya serta tanpa adanya paksaan pihak manapun.

Yogyakarta, 17 JUNI 2022

Informan

PEMERINTAH YOGYAKARTA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

(SALOMO SARAGI)

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

2. Foto lembar *membercheck* hasil penelitian:

LEMBAR *MEMBERCHECK* HASIL PENELITIAN

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA YOGYAKARTA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SALOMO SARAGI, A.Md.A.P.j.

Jabatan : PENGOLAH DATA PENAGIHAN PAJAK

Dengan ini menyatakan bahwa data yang diperoleh peneliti atas nama Muhammad Choirul Anam dengan NPM 182301019 dari Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta dalam penelitianya yang berjudul"Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Yogyakarta" adalah benar dari saya dan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Yogyakarta, 17 JUNI 2022

Informan

(SALOMO SARAGI)

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

2. Informan 2

Nama : Sekar Arum Kusuma Jati, A.Md. A.Pj.

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jl. Ahmad Wahid No.6, Banguntapan, Bantul.

Jabatan : Pengolahan Data Penagihan Pajak

Kode : I2

Foto Persetujuan dan pernyataan hasil *membercheck* dari Informan Penelitian:

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA
PERPUSTAKAAN

1. Foto pernyataan persetujuan menjadi informan:

LEMBAR PERSETUJUAN INFORMAN

Pernyataan kesediaan menjadi informan penelitian yang berjudul:

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA YOGYAKARTA

Identitas Informan

Nama : Sekar Arum Kusumo Jafi, SMd. A.B.

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jl. Ahmad Dahlan No. 6, Bangunharjo, Bantul

Jabatan : Pengelola Data Penagihan Pajak.

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi informan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Choirul Anam dari Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya serta tanpa adanya paksaan pihak manapun.

Yogyakarta, 17 Juni 2022

Informan

Sekar AKJ

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA
PERPUSTAKAAN

2. Foto *membercheck* hasil penelitian:

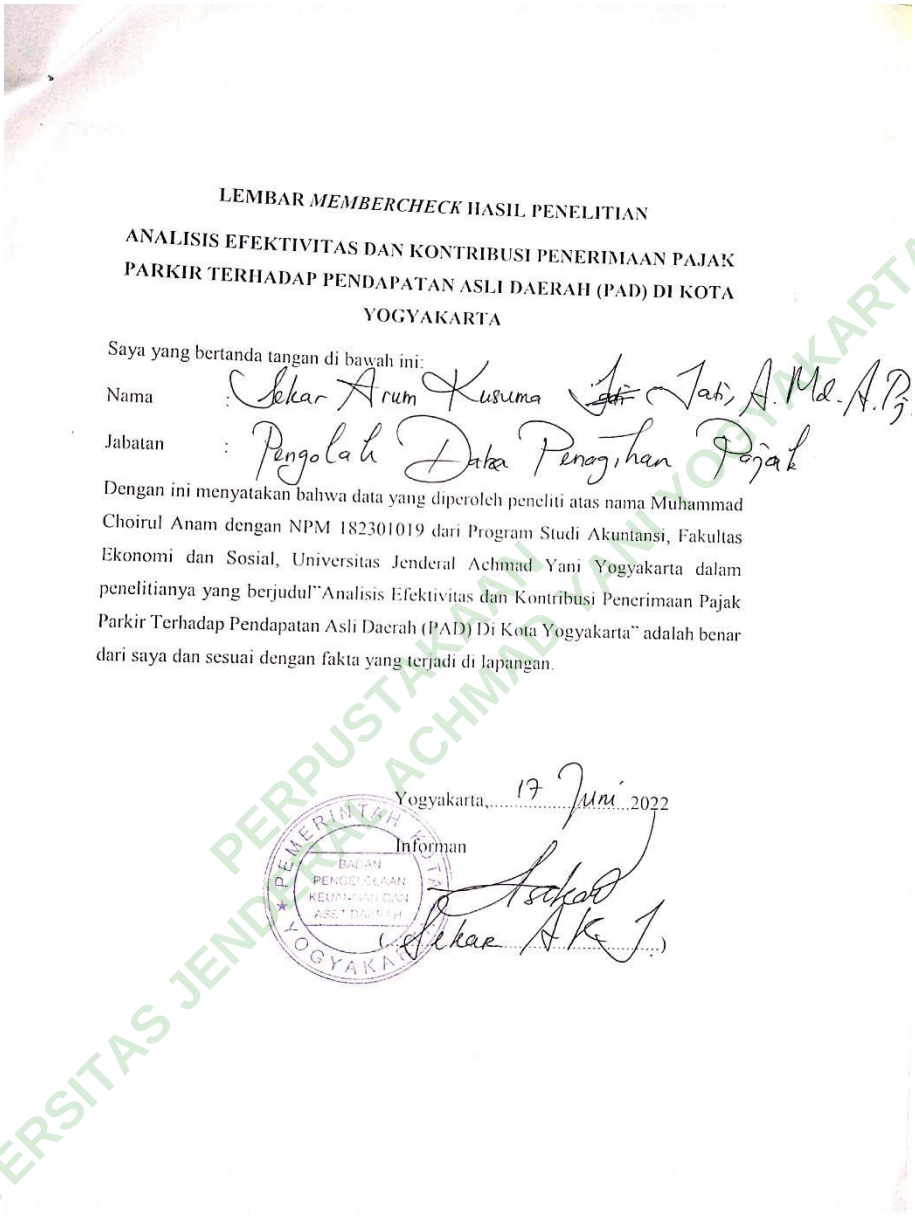

LEMBAR *MEMBERCHECK* HASIL PENELITIAN

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA YOGYAKARTA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sekar Arum Kusuma ~~Jati~~ Jati, A.Md.A.B.

Jabatan : Pengolah Data Penagihan Pajak

Dengan ini menyatakan bahwa data yang diperoleh peneliti atas nama Muhammad Choirul Anam dengan NPM 182301019 dari Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta dalam penelitianya yang berjudul"Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Yogyakarta" adalah benar dari saya dan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Yogyakarta, 17 Juni 2022

Informan

(Sekar A.K.)

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

3. Informan 3

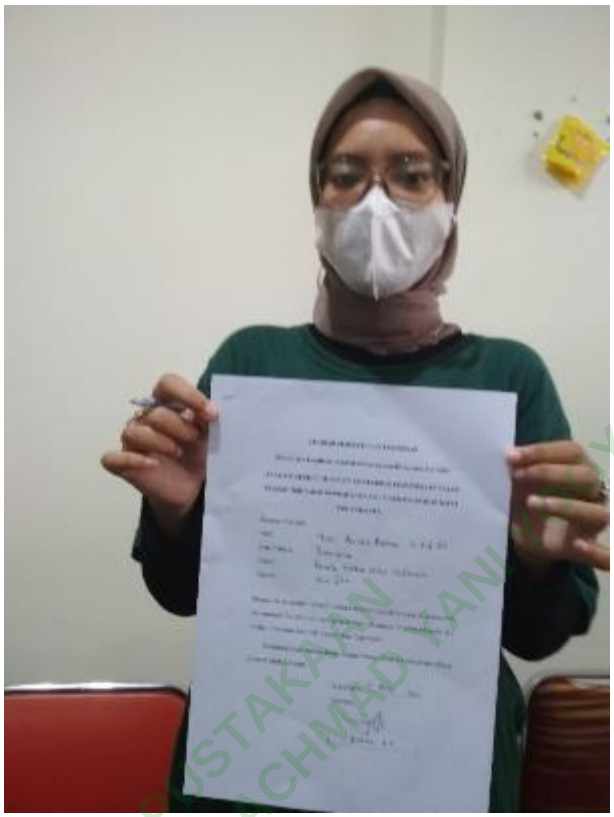

Nama : Nurul Amalia Hartono, A.Md.Ak.

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Rewulu Wetan 02/20/Sidokarto.

Jabatan : Juru Sita

Kode : I3

Foto Persetujuan dan pernyataan hasil *membercheck* dari Informan Penelitian:

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

1. Foto pernyataan persetujuan menjadi informan:

LEMBAR PERSETUJUAN INFORMAN

Pernyataan kesediaan menjadi informan penelitian yang berjudul:

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA YOGYAKARTA

Identitas Informan

Nama : Nurul Amalia Hartono, A.Md.AK.

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Pemulu Wetan 02/20 / Sidoarto

Jabatan : Juru Sita.

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi informan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Choirul Anam dari Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya serta tanpa adanya paksaan pihak manapun.

Yogyakarta, 17 Juni 2022

Informan

(Nurul A.H.)

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA
PERPUSTAKAAN

2. Foto pernyataan *membercheck* hasil penelitian:

LEMBAR *MEMBERCHECK* HASIL PENELITIAN

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA YOGYAKARTA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Amelia H, A.Md.Ak.

Jabatan : Juru Sita

Dengan ini menyatakan bahwa data yang diperoleh peneliti atas nama Muhammad Choirul Anam dengan NPM 182301019 dari Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta dalam penelitianya yang berjudul"Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Yogyakarta" adalah benar dari saya dan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Yogyakarta, 17 Juni 2022

Informan

(Nurul Amelia H.)

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA
PERPUSTAKAAN

4. Informan 4

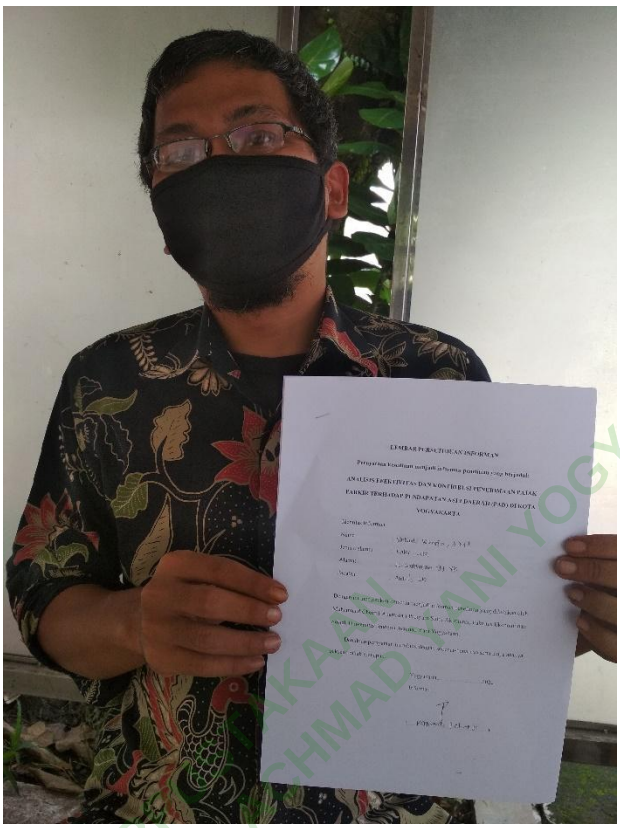

Nama : Pambudi Raharjo, A.Md.Ak.

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Jl.Gambiran 99 YK

Jabatan : Analis Laporan Keuangan

Kode : I4

Foto Persetujuan dan pernyataan hasil *membercheck* dari Informan Penelitian:

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

1. Foto Pernyataan Persetujuan Menjadi Informan

LEMBAR PERSETUJUAN INFORMAN

Pernyataan kesediaan menjadi informan penelitian yang berjudul:

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA YOGYAKARTA

Identitas Informan

Nama : Pandudi Kahrajo, A.Md

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Jl. Gandaran 99 YK

Jabatan : Analis LK

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi informan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Choirul Anam dari Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya serta tanpa adanya paksaan pihak manapun.

Yogyakarta, 14 Juni 2022

Informan

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Pandudi Kahrajo, A.Md

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA
PERPUSTAKAAN

2. Foto pernyataan *membercheck* hasil penelitian:

LEMBAR *MEMBERCHECK* HASIL PENELITIAN

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA YOGYAKARTA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pambudi Rahario, A.Md

Jabatan : Analis LK

Dengan ini menyatakan bahwa data yang diperoleh peneliti atas nama Muhammad Choirul Anam dengan NPM 182301019 dari Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta dalam penelitianya yang berjudul"Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Yogyakarta" adalah benar dari saya dan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Yogyakarta, 14 Juni 2022

Informan

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

(Pambudi Rahario, A.Md)

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA
PERPUSTAKAAN

5. Informan 5

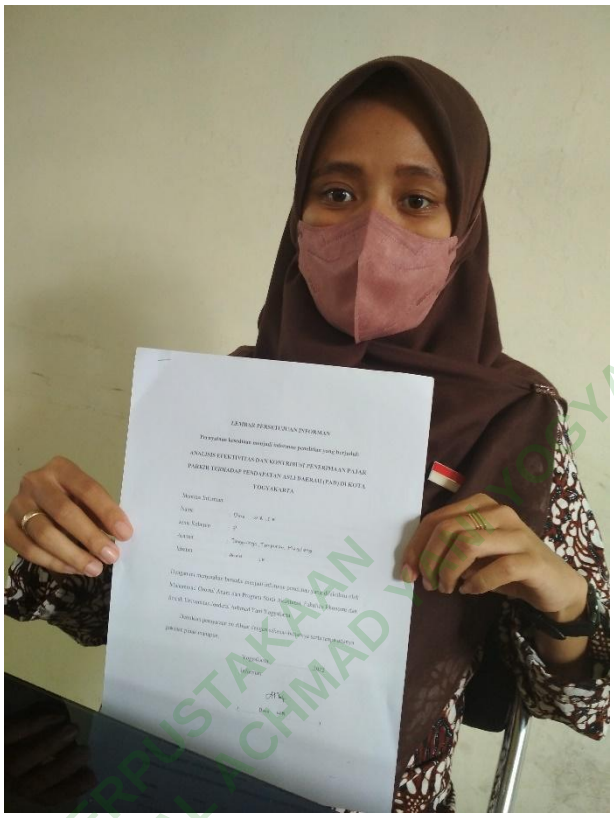

Nama : Dina W.R, S.E.

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Tanggulrejo, Tempuran, Magelang

Jabatan : Analis Laporan Keuangan

Kode : I5

Foto Persetujuan dan pernyataan hasil *membercheck* dari Informan Penelitian:

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA
PERPUSTAKAAN

1. Foto pernyataan persetujuan informan

LEMBAR PERSETUJUAN INFORMAN

Pernyataan kesediaan menjadi informan penelitian yang berjudul:

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA YOGYAKARTA

Identitas Informan

Nama : Dina WR, S.E

Jenis Kelamin : P

Alamat : Tanggulrejo, Tempuran, Magelang

Jabatan : Analis LK

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi informan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Choirul Anam dari Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya serta tanpa adanya paksaan pihak manapun.

Yogyakarta, 14 Juni 2022

Informan

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

(Dina WR, S.E)

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA
PERPUSTAKAAN

2. Lembar pernyataan *membercheck* hasil penelitian

LEMBAR *MEMBERCHECK* HASIL PENELITIAN

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA YOGYAKARTA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dina W.R, S.E

Jabatan : Analis LK

Dengan ini menyatakan bahwa data yang diperoleh peneliti atas nama Muhammad Choirul Anam dengan NPM 182301019 dari Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta dalam penelitianya yang berjudul"Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Yogyakarta" adalah benar dari saya dan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Yogyakarta, 14 Juni 2022

Informan

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Dina WR,S.E

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA
PERPUSTAKAAN

6. Informan 6

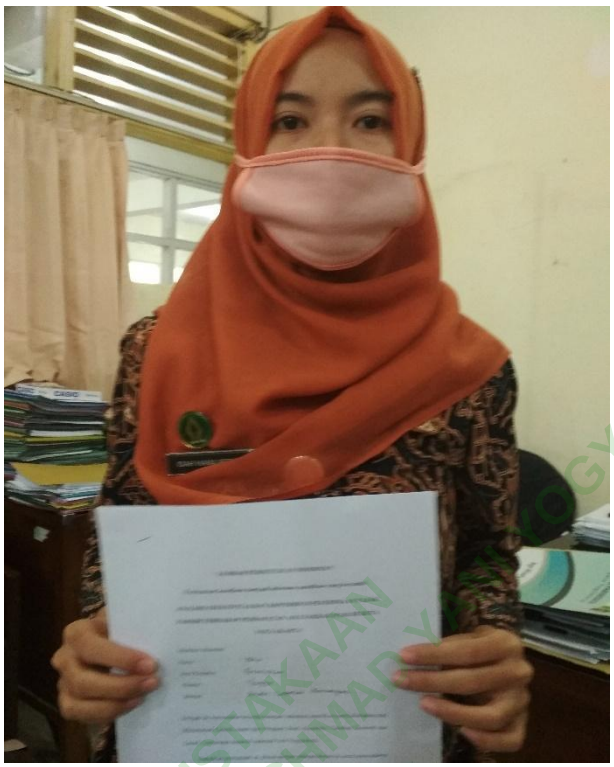

Nama : Isah, S.Akun.

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Yogyakarta

Jabatan : Analis Laporan Keuangan

Kode : I6

Foto Persetujuan dan pernyataan hasil *membercheck* dari Informan Penelitian**:**

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA
PERPUSTAKAAN

1. Foto pernyataan persetujuan informan:

LEMBAR PERSETUJUAN INFORMAN

Pernyataan kesediaan menjadi informan penelitian yang berjudul:

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA YOGYAKARTA

Identitas Informan

Nama : Isah

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Yogya

Jabatan : Anak Laporan Keuangan

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi informan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Chusnul Amam dari Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya serta tanpa adanya paksaan pihak manapun.

Yogyakarta, 14 Juni 2022

Informan

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Isah, S.Akun

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA
PERPUSTAKAAN

2. Foto Pernyataan *membercheck* hasil penelitian:

LEMBAR *MEMBERCHECK* HASIL PENELITIAN

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA YOGYAKARTA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isna

Jabatan : Analisis Laporan Keuangan

Dengan ini menyatakan bahwa data yang diperoleh peneliti atas nama Muhammad Choirul Anam dengan NPM 182301019 dari Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta dalam penelitianya yang berjudul"Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Yogyakarta" adalah benar dari saya dan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Yogyakarta, 14 Juni 2022

Informan

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

(Isna , S. Akun)

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

Lampiran 7 Transkrip Wawancara

1. **Informan 1**

Nama : Salomo Saragi, A.Md.A.Pj.
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Sanggrahan Plombon, Banguntapan, Bantul.
Jabatan : Pengolahan Data Penagihan Pajak
Kode : Informan 1 (I1), Peneliti (P)

Aktor	Kode Wawancara	Keterangan
P	P1	Sebelumnya, perkenalkan ya mas, saya Anam dari Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, yang sedang mengerjakan skripsi untuk mencapai gelar sarjana akuntansi, nah adapun data yang saya butuhkan yaitu terkait dengan proses penagihan, prosedur, serta realisasai penerimaan pajak parkir dan pendapatan asli daerah di kota yogyakarta dari tahun 2018-2021.
I1	I1.1	Tapi ini wawancaranya ga terkait data apa gtu kan mas?
P	P2	Ga mas, ini hanya sebatas pengetahuan SDM saja, kita ngobrol santai saja ya mas, seperti orang ngopi bareng
I1	1I.2	Iya mas, oke
P	P3	Berbicara terkait realisasi penerimaan pajak, dari sisi penagihan, apa faktor yang mempengaruhi berhasilnya proses realisasi penerimaan pajak parkir mas?
I1	I1.3	Yang namanya itu apa ya, Yang namanya penerimaan itu sebenarnya memang harus dari awal, jadi klo untuk datanya kan ada di bidang P4D sana, jadi datanya harus jelas dulu, maaksudnya itu nominal dasar pengenaan pajak dan pajak terutang yang diserahkan oleh wajib pajak yang disampaikan kesana itu harus jelas, baru nanti surat ketetapan pajaknya harus jelas dulu, itulah yang menjadi dasar untuk kita tagih di bidang penagihan, jadi sumua itu harus jelas dulu supaya kita bisa tahu jumlah tagihan wajib pajak tersebut itu berapa
P	P4	Jadi nanti misalkan udah tau misalkan WP pajak yang terutangnya segini, dengan di terbitkan SPTPD ya klo ga salah?
I1	I1.4	Kalau itu, dilaporkan sendiri wajib pajaknya, jadi kita cuman ngasih wadah aplikasi web

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

		tersebut, ntar wajib pajak sendiri yang eeee apa istilahnya kayak melaporkan gtu.
P	P5	Nanti pengsilanya berapa, terus pajaknya berapaa gtu
I1	I1.5	Iya itu nantu permasa perbulan,
P	P6	Untuk penagihanya sendiri setiap apa mas?
I1	I1.6	Kalau untuk pajak parkir itu dilaporkan dan disetorkan per masa, jadi misalnya januari nanti dilaporkan di maksimal tanggal 10 bulan berikutnya , nanti dibayarkan, itu dilaporkan ya, nanti dibayarkan di bulan 10 eh dibulan berikutnya *sorry* , misalnya kalo untuk pajak parkir pada masa januari nanti dilaporkan diFebruari tanggal 10 atau dan treakhir dibayarkan pada tanggal 20 Februari
P	P7	Kalo untuk di bulan Desember karena akhir tahun gimana?
I1	I1.7	Tetap mengikuti masa selanjutnya, intinya tu pasti dimasa berikutnya.
P	P8	Oke, kemudian dalam proses penagihan ada biaya yang dikeluarkan ga mas?
Ia	I1.8	Eee, untuk proses penagihan, misalnya untuk pajak parkir, paling ini ya, biaya kirim pos, untuk surat teguranya atau surat tagihanya, tapi itu bukan kita yang bayar nanti masuknya biaya operasional dinas Badan BPKAD.
P	P9	Oke oke, klo untuk jumlah pegawai di bagian penagihan berapa mas?
I1	I1.9	Di penagihan kita ada, sebentar, yang CPNS tu 10 orang, yang PNS, yang maban 2 orang, yang PNS 4 jadi 16 orang.
P	P10	Itu tugasnya apa aja itu mas?
I1	I1.10	Eee, 1 Kasubbid jadi kepala subbidang penagihan, itu tugasnya ya evaluasi, ngasih keputusan-keputusan nanti kita yang memproses gitu kan ada yang analis, itu nanti yang kaya biasanya nelaah permohonanwajib pajak gitu sama memantau perkembangan-perkembangan atau memantau eee realisasi pajak yang telah disetorkan oleh wajib pajak gitu,
P	P11	Kalau untuk prosedur penagihanya sendiri gimana mas?
I1	I1.11	Untuk prosedur penagihan itu berarti udah ada ketetapan dulu nih dari subbidang penetapan, nah itulah yang kita tagih, nanti itukan

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

		bentuknya data tunggakan gitu kan, itulah nanti yang kita tagih biasanya pertama kita kirim surat teguran dulu,dan apabila nanti wp akan mengajukan keberatan maka harus ada surat pernyataan tertulis dari wp tersebut.
P	P12	Jika Wpnya masih baru gimana mas?
I1	I1.12	Untuk WP setelah diserahkan NPWPD , dari sejak awal dari bidang pendaftaran itu kan yang bikin NPWPD udah disampaikan sama mereka, ini NPWPDmu, ini peraturan-peraturanya ini hak dan kewajiban wajib pajak
P	P13	Untuk sanksi apabila WP tidak membayar pajaknya apa sudah dijelaskan juga?
I1	I1.13	Harusnya sudah,
P	P14	Kemudian WP juga bisa mengajukan keberatan juga ya mas setau saya?
I1	I1.14	Iya, jadi kalau keberatanya di kabulkan, ini atas ketetapanya, nanti kita akan mengadakan pemeriksaan gitu dari bagian penetapan dan penagihan karena kan Wpnya itu banyak, nanti bakal ada temuan gitu, misal nanti kita lihat dari laporan keuanganya sama pajak yang dibayarkan kok terlalu dikit ya pajaknya, nan itulah yang disebut dengan temuan, dan temuan inilah yang nanti akan diterbitkan SKPDKB surat ketetapan pajak daerah kurang bayar , nah itulah nanti yang biasanya yang kita sampaikan ke wajib pajak dan kalu belum bayar belum bayar gitu , itu sesudah terbit itu nanti dikasih satu bulan untuk melakukan pelunasan, kalau belum lunas nanti kita tegur, jadi msalkan WP keberatan dengan SKPDKB tesebut nanti bisa mengajukan keberatan ke kita gtu.
P	P15	Itu nanti ada dispensasi yang diberikan apa bagaimana mas?
I1	I1.15	Itu nanti kalau wajib pajak mau mengajukan keberatan ada syaratnya, seperti pernyataan tertulis, harus ada juga perhitungan dia sendiri, nah harusnya segini tu , nanti baru kita telaah dengan data hasil pemeriksaan kita untuk nanti apakah di pertimbangkan diterima atau ditolak.
P	P16	Kemudian terkait prosedur mas, dari tahun ke tahun ada perubahan ga mas?
I1	I1.16	Prosedur terakhir itu aku lupa, cuman klo untuk prosedur terbaru yang 2022 itu kita yang buat, cuman kaya proses penegihan gtu ya jadi lebih

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

		banyak digitalisasi, kalau misal kita melakukan pembinaan itu jadinya lembar pembinaan itu kita arsip ga hanya fisik aja tapi juga secara digital, di foder penagihan sama di drive.
P	P17	Untuk prosedur yang ada sekarang sudah berjalan sesuai SOP belum mas?
I1	I1.17	Menurutku udah si, jadi misalnya nih kita mau penagihan lapangan kan, kita menunjukan ke wajib pajak ini surat tugasnya, saya ini perkenalan diri, kemudian menyampaikan tujuan kita apa.
P	P18	Saat proses penagihan ada perlawanan dari wajib pajak ga mas?
I1	I1.18	Eee, tergantung dari wajib pajaknya, ada yang nggeh nggeh aja tapi ga ada respon, kemudian ada yang kaya kurang stuju, ada yang aduh saya kurang tau ini yang ngurusin ini ini ini gitu ada, ya kaya gitu gitu trs ada yang oh ya nanti di hubungi aja lagi, tapi ternyata ga menghubungi.
P	P19	Padahal itu sudah di kasih tau ya mas sejak NPWPDnya jadi,
I1	I1.19	Iya, padahalkan SPTKBnya sudah di terbitkan dan nantinya jadi bahan kita untuk melakukan penagihan.
P	P20	Setelah itu harusnya wajib pajak tinggal melakukan pembayaran pajaknya aja kan mas? Misal nanti kurang bayar atau lebih bayar, kalau untuk yang lebih bayar itu nanti gimana?
I1	I1.20	Kalau yang pajak pusat setau saya bisa dikompensasikan ke pajak berikutnya kan, tapi kalo untuk yang disini bisa diajukan restitusi , kalo untuk yang pajak daerah di bagian pelayanan untuk nanti dilihat nomor rekening dan jumlah yang akan di restitusikan
P	P21	Kemudian dengan adanya prosedur yang berlaku sekarang menggunakan yang lama atau yang kemarin baru di susun tapi belum disahkan aja?
I1	I1.21	Eee kalo yang lama itu cebderung lebih konvensional, klo yang sekarang lebih ada digitalalisasinya gitu si tapi pada dasarnya sama terkait arsipnya gitu aja si
P	P22	Dengan adanya SOP yang baru ini disusun mas, mampu meningkatkan realisasi penerimaan pajak ga mas, khususnya pajak parkir?

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA
PERPUSTAKAAN

I1	I1.22	Sebenernya klo untuk penerimaanya ga secara langsung si, karena itu lebih ke keatuhan, kesadaran wajib pajak tersebut, dan untuk proses penagihanya sama seperti dulu tapi memang ada beberapa wajib pajak yang tidak memiliki itikad untuk membayarkan pajaknya, jadi susah
P	P23	Kemudian tekait penagihan, ada sosialisasinya ke WP ga mas?
I1	I1.23	Oke untuk terkait sosisalisasi perpajakan itu di BPKAD di pegang oleh subbidang kita, jadi itu sosialisasi yang secara umum gitu, kalau mau secara spesifik gitu wajib pajak bisa datang langssung ke kami gitu, nanti apapun yang dia tanya akan kita jelasin, nanti dikelurahan-kelurahan gitu biasanya
P	P24	Baik mngkin hanya itu saja mas, terima kasih atas penyampaianya sukses untuk kedepanya ya mas,
I1	I1.24	Sama sama mas, terima kasih

2. Informan 2

Nama : Sekar Arum Kusuma Jati, A.Md. A.Pj.
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Ahmad Wahid No.6, Banguntapan, Bantul.
Jabatan : Pengolahan Data Penagihan Pajak
Kode : Informan 2 (I2), Peneliti (P)

Aktor	Kode Wawancara	Keterangan
P	P1	Lagi sibuk banget ga ini mbak?
I2	I2.1	Ga mas, aman
P	P2	Oke, sebelumnya perkenalkan saya anam dari universitas jenderal achmad yani yogyakarta yang sdang mengerjakan skripsi untuk menyelesaikan studi saya, jadi kalau terkait realisasi penerimaan pajak ya mbak, apa yang menjadi faktor keberhasilan dalam merealisasikan penerimaan pajak mbak, khususnya pajak parkir?

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

I2	I2.2	Pajak parkir ya, kalau pajak parkir pastinya dari pendataan dan pendaftarandulu, kemudian untuk pajak parkir itu masa ya mas bentuknya,jadi untuk setiap bulannya biasanya ada realisasi mulai dari pelaporan sebulanya berapa disetorkan, itu ada jatuh temponya,kalau untuk pajak daeraj itu setiap tanggal 10 di setiap bulan maksimal itu untuk pelaporan dan penyetoran itu sampai tanggal 10 bulan berikutnya kamudian kalau lewat dari tanggal 10 itu berrarti ada tunggakan, nanti akan dilakukan penagihan atas,
P	P3	Brarti kalau WP memiliki kesadaran yang baik pasti akan membayar tepat waktu tanpa harus di berikn surat penagihan ya mbak?
I2	I2.3	Iya bener mas,
P	P4	Kemudian untuk proses penagihanya ada biaya yang dikeluarkan ga mbak?
I2	I2.4	Kalau dipenagihan, biasanya sementara kan masih sebatas pemanggilan ke WP, namun untuk kedepanya karena sudah ada juru sita untuk istilahnya ada wp yang bandel itu diterbitkan sejenis surat paksa, surat teguran, tapi kalau untuk sekarang hanya pemanggilan ke WP untuk sebatas apa ya, eee persuasif la.
P	P5	Ada ga mbak yang sampai diberikan surat paksa?
I2	I2.5	Kalau sampai saat ini belum sampai ke surat paksa belum, biasanya kalau WP parkir itu karena Wpnya ga banyak, dan nominalnnya ga besar itu jarang berkasus la istilahnya jadi biasanya secara persuasif.
P	P6	Kemudian ada berapa jumlah pegawai di subbidang penagihan?
I2	I2.6	Di subidang penagihan itu ada 16 termasuk kepala subbidang,
P	P7	Itu semuanya untuk proses penagihan lapanganya aa ga mbak?
I2	I2.7	Itu biasanya ke 15nya itu, kemudian untuk kepala subbidangnya jarang untuk turun ke lapangan.
P	P8	Terkait penagihan ke lapangan itu karena apa mbak?
I2	I2.8	Itu biasanya karena ga bayar dan tidak melaporkan kewajibanya.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

P	P9	Kemudian untuk prosedur penagihanya itu seperti apa mbak?
I2	I2.9	Biasanya kalau setiap bulan jatuh tempo itu kami menerbitkan surat teguran atau surat himbauan pembayaran namun jika bebrapa kali tidak ada respon sejak surat tersebut dikirimkan akan diadakan pemanggilan dengan bekerja sama dengan satpol pp, tapi sekarang hanya sebatas dipanggil ke kantor aja.
P	P10	Kemudian ada perubahan prosedur ga mbak dari tahun ke tahun mbak?
I2	I2.10	Kalau perubahan untuk saat ini pada dasarnya masih sama yaitu memanggil WP kalo ga kita turun kelapangan, tapi saat ini, baru tahun kemarin ada juru sita jadi jadi untuk selanjutnya akan ada sita itu tadi. Tapi untuk SOP sekarang ini baru akan menerapkan ke arah sita. Dan itu merupakan tindakan yang paling akhir.
P	P11	Brarti kalau untuk terkait sita memang Wpnya membandel ya mbak?
I2	I2.11	Iya karena sebelumnya sudah diterbitkan surat teguran, tapi belum juga mebayar maka nanti akan dipanggil melalui kejaksaan, tapi masih kalau belum ini baru yang paling akhir akan merujuk pada arah sita.
P	P12	Apakah ada arahan dari subbidang penagihan dan keberatan kepada wajib pajak terlait proses penagihan?
I2	I2.12	Jadi awalnya WP yang bersangkutan kita panggil melalui kejaksaan, nanti kejaksaan yang akan menjelaskan secara persuasif, masih belum ada tindakan hukumnya, kemudian ditanya mau melakukan pembayaran kapan, namun apabila tidak kunjung membayar nanti akan berujung pada sita.
P	P13	Tapi emang sudah dikasih tau sejak awal saat di pendaftaran nanti bahwa nanti saat penagihan tapi ga bayar saat waktunya jatuh tempo nanti akan diberikan surat teguran seperti ini, setelah itu jika WP tidak membayarkan pajaknya harus dupaksakan bayardengan cara seperti ini, ada gak?

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

I2	I2.13	Biasanya dari awal WP itu kalau mau pendaftaran NPWPD itu sudah dijelaskan kewajibanya apa terus harus bagaimana itu sudah harus dijelaskan, jadi dianggap tau mereka itu tentang kawajiban perpajakan.
P	P14	Okee, tapi untuk prosedur yang sekarang sudah sesuai dengan semestinya belum?
I2	I2.14	Sejauh ini karena memang semua tindakan itu ada dasar hukumnya mas, jadi ketika kita akan melakukan tindakan pasti ada payung hukumnya.jadi ga mungkin kita melakukan sesuatu yang di luar SOP Jadi udah sesuai dan sudah efektif.
P	P15	Jadi untuk sekarang ini prosedur yang ada sudah sesuai ya mbak?
I2	I2.15	Sudah sesuai, menurutsaya sudah sesuai.
P	P16	Kalau sudah sesuai, namun ada perlawanan dari WPnya ga mbak?
I2	I2.16	Kalau perlawanan biasanya WP-WP yang susah itu ada, ada juga WP yang ikut sama arahan kita , ada WP yang masih mengelak, misal mwnunda pembayaranya.
P	P17	Alasan- alasanya seperi apa aja itu mbak?
I2	I2.17	Eeee mngkin dari sisi keuangan mereka yang belum memandai, karena kalau pajak itu kalau terlambat kan ada dendanya nah terus bertambah kan, dari situ kan mereka harus menanggung yang mngkin nominalnya ga sedikit dari segi keuanganya mereka atau memang niatnya mereka untuk memundurkan pembayaran gitu.
P	P18	Intinya ga mau bayar gitu ya
I2	I2.18	Iya mas
P	P18	Okee, nah dengan adanya prosedur yang ada itu mampu meningkatkan realisasi penerimaan pajaknya ga mbak?
I2	I2.18	Eeee meningkatkan, meningkatkan karena semenjak ada penagihan yeng lebih tegas itu WP istilahnya lebih takut jika nanti d panggil kejaksaan, apalagi ada monitoring KPK, itu biasanya WP melunak da akhirnya mau ga mau bayarnya teratur dan sesuai.
P	P19	Untuk SPTPDnya sekarang sudah digital atau masih konvensional?

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA
PERPUSTAKAAN

I2	I2.19	Kalau sekarang SPTPD itu sudah digital E-SPTPD, jadi sekarang itu WP diberikan *user* sama *password* buat masuk akun yang disediakan, setelah itu akan dapat kode billing, dan kode billing itu nanti yang digunakan ke kas daerah.
P	P20	Ooo gitu ya, jadi ini yang bagian penagihan koordinasi sama yanggg....
I2	I2.20	Koordinasi sama yang pendaftaran dan penetapan karena bidang penagihan kalo disana itu bidang yang masih satu alur proses.
P	P21	Satu alur proses ya....kemudian dalam menerapkan prosedur yang ada ke wajib pajak itu ada kendala ga mbak, kan sekarang harus ada pemanggilan, dan mngkin belum semuanya wajib pajak itu tau kalau ini seperti ini prosesnya gitu ada kesulitan ga?
I2	I2.20	Kesulitanya sebenernya lebih ke cara untuk meyakinkan memeksa WP bayar itu karena Wpnya yang membandel, sulit pendekatan kitanya aja sulitnya disitutapi kalau untuk prosedurnya ga ada kesulitan.
P	P22	Baik hanya itu saja mbak Jati
I2	I1.22	Kalau datanya terkait penerimaan itu sudah dapat atau belum?
P	P23	Sudah kemarin sebenernya mbak, cuman karena kemarin sampai sore jadi baru saya lanjutkan kesini,
I2	I2.23	Sama siapa ininya?
P	P24	Di bagian Akuntansi dan Pelaporan
I2	I2.24	Ooh Akuntansi dan Pelaporan,berarti datanya udah *clear*
P	P25	Iya mbak, sudah

3. Informan 3

Nama : Nurul Amalia Hartono, A.Md.Ak.
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Rewulu Wetan 02/20/Sidokarto.
Jabatan : Juru Sita
Kode : I3

Aktor	Kode Wawancara	Keterangan
P	P1	Baik, selamat pagii mbak nurul ya
I3	I3.1	Iyaa, pagii

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

P	P2	Baik saya langsung saja ya mbak, perkenalkan saya anam dari universitas jenderal achmad yani yogyakarta yang saat ini menempuh semester 8, maka untuk menyelesaikan studi saya saya harus mengerjakan skripsi dimana hal tersebut maka saya data kesini untuk menegerjakan skripsi saya yang terkait dengan pajak daeah Kota Yogyakarta, berbicara terkait pajak daerah itu apa yang mempengaruhi keberhasilan dalam proses penagihan pajak parkir mbak?
I3	I3.3	Eee ini sebenarnya ga terkhusus ke pajak parkir ya tapi ke semua pajak daerah hampir sama, jadi untuk penagihan itu tergantung sama eee potensi wajib pajak itu sendiri, dia tu ada kemampuan ga dalam membayar pajak, jadi sebenernya inti dari penagihan itu tergantung Wpnya si berpotensi untuk di tagih atau ga, dia masih punya aset, atau usahanya masih jalan atau ga usahanyaaa, kalau usahanya udah tutup tu kita ga terlalu nagih si, jadi kita khusus ke yang masih buka aja si karena dia kan masih memiliki potensi untuk di tagih,
P	P4	Kalau misalkan, usahanya ada di tempat lain gitu gmana mbak, misal yang di survei hanya 1, namun ada usaha yang laian yang masih beroperasi,
I3	I3.4	Jadi memang harus semua si, tapi ge langsung semua di survei jadi nanti bertahap, kalo itu nanti ada di proses pendaftaran jadi nanti mereka yang tiap hari ke lapangan nanti datang untuk WP pajak parkir gitu, tapi memang bertahap ga bisa langsung semua
P	P5	Di survei ya?
I3	I3.5	Di survei iya, terus nanti ada proses pendataan
P	P6	Kemudian dari sisi penagihan mbak, ada biaya yang dikeluarkan ga?
I3	I3.6	Jelas ada kan, dari yang formal surat, surat teguran itu kita nyetak pake print, pake kertas, juga ngirimya ke WP juga pake POS ya itu juga kita ada kerja sama dengan kantor POS jadi kita istilahnya kita bayar juga, bayar biaya ongkir selain itu juga eeeeem kalau di kasih surat teguran nanti WP akan di panggil kesini tu dia butuh materai trs nanti kalo kita kesana penagihan lapangan itu kita juga, tapi kalo itu

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

		ongkos sendiri si, kek bensin gitu gitu, tapi lebih banyak ya ongkosnya di administrasi si
P	P7	Kemudian untuk jumlah pegawainya berapa si mbak kalo di bagian penagihan?
I3	I3.7	15 udah sama kasubbid
P	P8	Itu berarti nanti kalo yang survei itu di bagian mana aja itu mbak?
I3	I3.8	Kalo, survei dan pendataan di pendaftaran, kalo kita kan udah nerima data ni wajib pajak mana aja yang ga bayar itu, jadi nanti atas data itu kita baru penagihan.
P	P9	Itu nanti proses penagihanya berapa lama mbak, misal dari pengiriman surat teguran, nanti misal sudah 1 bulan ga ada balasan atau tanggapan baru nanti masuk ke WP langsung gitu
I3	I3.9	Iyaa jadi dari pencetakan surat teguran yang pertama itu kan keliatan nih kok Wpnya muncul lagi gitu brarti itu belum bayar nah itu nanti baru kita proses lagi, terus nanti dari pemanggilan, klo dia datang kan ada pernyataan saya akan membayar paling ga 3 bulan gtu misalnya kemusian kita tunggu 3 bulan , kalo setelah itu ga bayarlagi baru kita datengin gitu,, jadii kalo ada pernyataan kita tunggu sesuai yang dia mau gimana, tapi kalau emang dia ga ada itikad baiknya atau gimana biasanya sebulan sejak pemanggilan, sebulan sejak pengiriman surat paksa maka kita proses lebih lanjut lagi..
P	P10	Okee, kalau Wpnya bilangnya setahun gitu bisa ga mbak?
I3	I3.10	Maksimal setahun, maksimal setahun
P	P11	Ooo, maksimal setahun
I3	I3.11	Setahun masih kitaaa pantau sih
P	P12	Kemudian terkait prosedur penagihan pajaknya itu sendiri gimana mbak?
I3	I3.13	Eeee gimana nih maksudnya?
P	P14	Jadi misal Wpnya udah ditetapkan, WP udah terdaftar brarti data udah masuk Wpnya udah jelas dan pajaknya sudah jelas dan seuai perhitungan baru nanti dilakukan penagihan atau bagaimana mbak?
I3	I3.14	Eeeem jadi nanti pertama di daftar dulu ya, di dataaa, terus nanti kalau pajak parkir itu dia *Self Asessment* ya jadi dia sendiri harus lapor setor

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

		juga nanti atas yang dia setorkan kita periksa dulu, setelah kita periksa kalau dia nihil berarti udah samapai situ aja tapi kalo ada kuang bayar kita lihat datanya terus nanti muncul daftar tunggakanya nah nanti, dari daftar tunggakan itu biasanya aku pilah per kelurahan jadi kita itu kita udah ada timnya , tim 1 itu ke kelurahan mana aja tim 2 kemana ajaa nanti jadi di pilih perkelurahan terus nanti mereka jalan,
P	P15	Tadi kan menyinggung kurang bayar ya mbak, kalu misalkan lebih bayar itu nanti gimana?
I3	I3.15	Kalo lebih bayar nanti jatuhnya ke restitusi
P	P16	Oooh di restiusi
I3	I3.16	Tapi jarang banget si
P	P17	Bukan di limpahkan ke masa yang akan datang ya
I3	I3.17	Kita lebih ke restitusi si
P	P18	Kemudian terkait dengan restitusi ada perubahan ga mbak terkait prosedurnya?
I3	I3.18	Kalo prosedur gitu gitu aja si cuman kali yang kita lakukan di lapangan kan pasti ada yang diperbaiki dikit dikit, kek misal surat pernyataanya kurang apa kurang apa gitu kita perbaiki seiring berjanya waktu sih, cuman kalo setandarnya ga bisa di rubah setiapsaat kaan jadi nanti kalo misalkan ada perubahan yang masif baru kita rubah SOPnya, contoh kek yang ini selalu bikin SOPnya itu kan kemarin baru mau dirubah pas kita masuk kerja kemarin, mulai masuk kerja itu karena ada perubahan yang masif, kalo ga ya enggak
P	P19	Oiya kalo sekarang kan lebih banya semuanya itu digital ya mbak
I3	I3.19	He em
P	P20	Itu sekarang gimana? Ada ga tentang digitalisasi?
I3	I3.20	Kalo digitalisasinya lebih kee dokumen dokumenya itu kita scan biar berkasnya rapih terus jug nanti hasilnya kita rekap sendiri jadi nanti ada rekapitulasi WP ini nanti hasilnya apa aja dari yang pemanggilan pertahun, pemanggilan ka dua terus nanti penagihan gitu nanti udah ada jadi kita bisa mantau perkembanyanya, jadi untuk digitalisasinya lebeh kesitu si lebi mudah juga mantaunya,

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA
PERPUSTAKAAN

P	P21	Ga harus pegang hardfile ya nanti belum kalau ilang atau gimana gtu kan
I3	I3.21	Nanti hardcopy tetepkita simpen rapih si, jagi mager ya bukanya enak lewat yang udah di scan
P	P22	Kemudian terkait dengan prosedur penagihan itu ada arahan dari bidang penagihan ga mbak ke WP misal nanti ini lho proses penagihanya seperti ini, nanti kalau udah baru saya tagih yaa gtu, ada ga?
I3	I3.22	Adaa, kita jelaskan terus sih kalo kita nagih , pak ini kita datang menagih karna kemarin bapak diperiksa bapak ada kurang bayarnya kemarin bapak sudah setuju dengan nominal segini, jadi kami datang karena bapak belum ada realisasi nih samapai jatuh tempo, jatuh temponya kan satu bulan itu nah dalam jangka waktu 1 bulan ini bapak belum ada pembayaran makanya kami datang, atau bapak kami panggil seperti itu
P	P23	Kalau tadi kan di sampaikan 1 tahun jadi nanti tetap nunggu?
I3	I3.23	Tetep kita pantau si perkembanganya, jadi tahun itu tu dia ga boleh yang gaada realisasi sama sekali, tapi kadang kan banyak ya kurang bayarnya bisa 12 atau dua belas, nah dalam jangka waktu 1 tahun itu dia kan janjinya mau menyelesaikan semua, jadi paling ga tu setiap 3 bulan sekali harus ada realisasi.
P	P24	Okee. Klo untuk prosedurnya itu sendiri sudah berjalan dengan semestinya belum mbak dalam proses penagihan?
I3	I3.24	Udah si, secara garis besar udah kare
P	P25	Kalau yang sekarang yang udah di perbaharui tapi belum disahkan aja gmana, apa sudah berjalan?
I3	I3.25	Yang itu lebih detail si dibanding dengan yang awal,
P	P26	Berarti memang sudah sesuai ya mbak?
I3	I3.26	Iya mas
P	P27	Kalo menurut mbak nurul sendiri perlu di revisi ga mbak dari prosedur yang ada sekarang?
I3	I3.27	Kebetulan aku juga yang nyusun kan kemarin SOPnya jadi kalau untuk saat ini belum, itu yang paling efektif dan nanti kalo eiring berjalanya dilaksanakan kan jadi tau

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

		kekuranyanya apa tapi kalau untuk saat ini menurutku udah yang pali efektif si itu
P	P28	Kali saat proses penagihan ada perlawanan dari wajib pajak ga mbak?
I3	I3.28	Banyak banget si pasti, alasanya beraneka ragam dari kita udah pailit mbak, udah tutup, teruss ada juga yang janjian hari ini ditungguin ga dateng nanti aku janjian lagi nanti saat di hubungi beralasan sibuk dan memberi wacana akan menghubungi kita lagi, kemudian sudah bilang mau datang minggu depan tapi ga dateng lagi kaya gitu, banyak si kalo kaya gitu dilapangan,
P	P29	Tapi akhirnya itu bagaimana?
I3	I3.29	Jadi kan karakteristik WP itu beda-beda ada yang ditagih ga bayar nanti pah di panggil bayar, ada yang didatengin didatengin di panggil juga ga bayar nanti di panggil kejaksaan nanti baru takut baru bayar,
P	P30	Oh gituu
I3	I3.30	Jadi beda-beda sii he em, jadi harus kaya ada ancaman dulu si kalo yang ngeyel gitu,
P	P31	Dengan adanya prosedur yang sekarang itu mampu meningkatkan realisasi penerimaan pajaknya ga mbak?
I3	I3.30	Eee kalo sebelumnya kan SOP penagihan itu cuma penagihan lapangan sama surat teguran ya, tapi kalo sekarang ada pemanggilan WP jadi ya lumayan ada peningkatan walau ga banyak hehe
P	P31	Kemudian dengan adanya prosedur yang baru itu ada kendala ga dalam menerapkanya ke proses penagihan?
I3	I3.31	Kalo kendalanya gaada si,
P	P32	Baik terimakasih ya mbak di sela-sela kesibukanya bisa menyempatkan diri untuk wawancara dengan saya, hehe
I3	I3.32	Iya sama sama, semoga lancar ya skripsinya hehe
P	P33	Aamiin

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

Lampiran 8 Data Penerimaan Pajak Parkir dan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Periode 2018-2021

No	Tahun	Pajak Parkir		Pendapatan Asli Daerah
		Target	Realisasi	
1.	2018	Rp3.500.000.000,00	Rp3.525.732.992,00	Rp667.493.075.470,00
2.	2019	Rp3.675.000.000,00	Rp3.050.479.181,00	Rp689.049.725.509,27
3.	2020	Rp1.600.000.000,00	Rp1.851.049.591,00	Rp563.174.371.396,88
4.	2021	Rp2.000.000.000,00	Rp2.034.806.805,00	Rp598.121.885.337,87

Sumber: BPKAD Kota Yogyakarta

Lampiran 9 Perhitungan Efektivitas Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Target Yang Telah Ditetapkan Periode 2018-2021

Tahun	Target (1)	Realisasi (2)	Perhitungan (2)/(1)X100%	Hasil	Kategori
2018	Rp3.500.000.000,00	Rp3.525.732.992,00	$\frac{Rp3.525.732.992,00}{Rp3.500.000.000,00} X\ 100\%$	100,74%	Sangat Efektif
2019	Rp3.675.000.000,00	Rp3.050.479.181,00	$\frac{Rp3.050.479.181,00}{Rp3.675.000.000,00} X\ 100\%$	83,01%	Cukup Efektif
2020	Rp1.600.000.000,00	Rp1.851.049.591,00	$\frac{Rp1.851.049.591,00}{Rp1.600.000.000,00} X\ 100\%$	115,69%	Sangat Efektif
2021	Rp2.000.000.000,00	Rp2.034.806.805,00	$\frac{Rp2.034.806.805,00}{Rp2.000.000.000,00} X\ 100\%$	101,74%	Sangat Efektif

Sumber: Data Diolah Peneliti

Lampiran 10 Perhitungan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Periode 2018-202

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (1)	Realisasai Pajak Parkir (2)	Perhitungan	Hasil	Kategori
2018	Rp466.156.141.925,05	Rp3.525.732.992,00	$\frac{Rp3.525.732.992,00}{Rp466.156.443.990,00} X\ 100\%$	0,76%	Sangat Kurang
2019	Rp689.049.725.509,27	Rp3.050.479.181,00	$\frac{Rp3.050.479.181,00}{Rp689.049.725.509,27} X\ 100\%$	0,44%	Sangat Kurang
2020	Rp563.174.371.396,88	Rp1.851.049.591,00	$\frac{Rp1.851.049.591,00}{Rp563.174.371.196,88} X\ 100\%$	0,33%	Sangat Kurang
2021	Rp598.121.885.337,87	Rp2.034.806.805,00	$\frac{Rp2.034.806.805,00}{Rp598.121.885.337.87} X\ 100\%$	0,34	Sangat Kurang

Sumber: Data Diolah Peneliti

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

Lampiran 11 Prosedur Penagihan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta

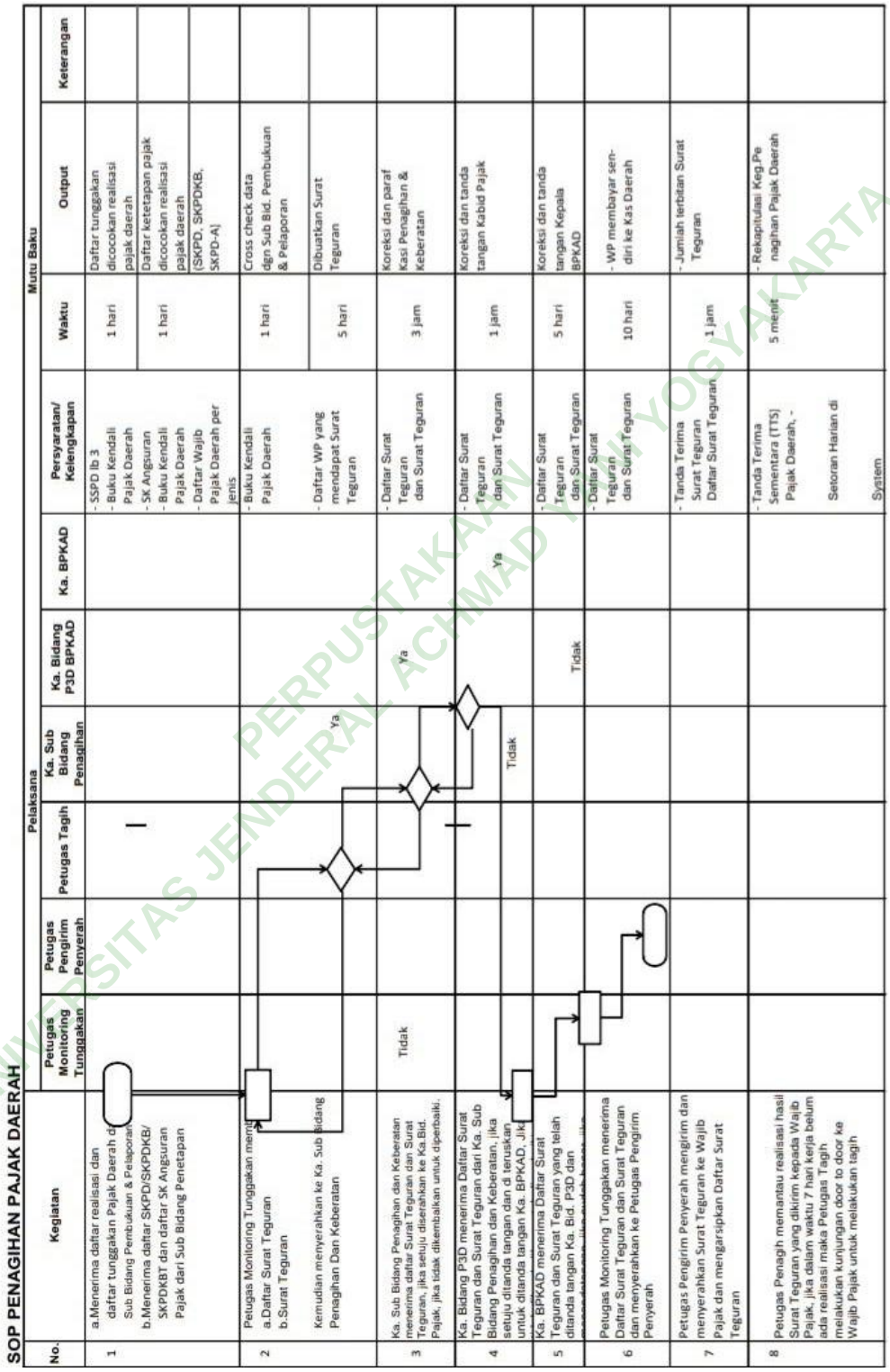

SOP PENAGIHAN PAJAK DAERAH

No.	Kegiatan	Pelaksana: Petugas Monitoring Tunggakan	Petugas Pengirim Penyerah	Petugas Tagih	Ka. Sub Bidang Penagihan	Ka. Bidang P3D BPKAD	Ka. BPKAD	Mutu Baku: Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	a.Menerima daftar realisasi dan daftar tunggakan Pajak Daerah di Sub Bidang Pembukuan & Pelaporan b.Menerima daftar SKPD/SKPDKB/ SKPDKBT dan daftar SK Angsuran Pajak dari Sub Bidang Penetapan			—				- SSPD lb 3 - Buku Kendali Pajak Daerah - SK Angsuran - Buku Kendali Pajak Daerah - Daftar Wajib Pajak Daerah per jenis	1 hari 1 hari	Daftar tunggakan dicocokan realisasi pajak daerah Daftar ketetapan pajak dicocokan realisasi pajak daerah (SKPD, SKPDKB, SKPD-A)	
2	Petugas Monitoring Tunggakan memi a.Daftar Surat Teguran b.Surat Teguran Kemudian menyerahkan ke Ka. Sub Bidang Penagihan Dan Keberatan				Ya			- Buku Kendali Pajak Daerah - Daftar WP yang mendapat Surat Teguran	1 hari 5 hari	Cross check data dgn Sub Bid. Pembukuan & Pelaporan Dibuatkan Surat Teguran	
3	Ka. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan menerima daftar Surat Teguran dan Surat Teguran, jika setuju diserahkan ke Ka.Bid. Pajak, jika tidak dikembalikan untuk diperbaiki.	Tidak				Ya		- Daftar Surat Teguran dan Surat Teguran	3 jam	Koreksi dan paraf Kasi Penagihan & Keberatan	
4	Ka. Bidang P3D menerima Daftar Surat Teguran dan Surat Teguran dari Ka. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan, jika setuju ditanda tangan dan di teruskan untuk ditanda tangan Ka. BPKAD, Jika			—	Tidak		Ya	- Daftar Surat Teguran dan Surat Teguran	1 jam	Koreksi dan tanda tangan Kabid Pajak	
5	Ka. BPKAD menerima Daftar Surat Teguran dan Surat Teguran yang telah ditanda tangan Ka. Bid. P3D dan					Tidak		- Daftar Surat Teguran dan Surat Teguran	5 hari	Koreksi dan tanda tangan Kepala BPKAD	
6	Petugas Monitoring Tunggakan menerima Daftar Surat Teguran dan Surat Teguran dan menyerahkan ke Petugas Pengirim Penyerah							- Daftar Surat Teguran dan Surat Teguran	10 hari	- WP membayar sen-diri ke Kas Daerah	
7	Petugas Pengirim Penyerah mengirim dan menyerahkan Surat Teguran ke Wajib Pajak dan mengarsipkan Daftar Surat Teguran							- Tanda Terima Surat Teguran Daftar Surat Teguran	1 jam	- Jumlah terbitan Surat Teguran	
8	Petugas Penagih memantau realisasi hasil Surat Teguran yang dikirim kepada Wajib Pajak, jika dalam waktu 7 hari kerja belum ada realisasi maka Petugas Tagih melakukan kunjungan door to door ke Wajib Pajak untuk melakukan tagih							- Tanda Terima Sementara (TTS) Pajak Daerah, - Setoran Harian di System	5 menit	- Rekapitulasi Keg.Pe nagihan Pajak Daerah	

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

Lampiran 12 Realisasi Pendapatan Asli Daerah 2018

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018
(AUDITED)

Halaman 1

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN DAERAH	1.698.804.931.325,00	1.736.919.997.862,62	38.115.066.527,62	102,24
1 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
1 1 1	Pajak Daerah	613.890.504.437,00	667.493.075.470,14	53.602.571.033,14	108,73
1 1 2	Retribusi Daerah	398.156.500.000,00	407.573.263.422,00	9.416.763.422,00	102,37
1 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	33.387.993.296,00	33.984.531.787,00	596.538.491,00	101,79
1 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	28.013.979.674,00	28.032.365.012,83	18.385.338,83	100,07
		154.332.031.467,00	197.902.915.248,31	43.570.883.781,31	128,23
1 2	DANA PERIMBANGAN				
1 2 1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	896.567.100.993,00	867.706.455.746,00	(28.860.646.248,00)	96,78
1 2 2	Dana Alokasi Umum	66.079.502.000,00	46.678.379.697,00	(19.401.122.303,00)	70,64
1 2 3	Dana Alokasi Khusus	658.504.186.000,00	658.504.186.000,00	-	100,00
		171.973.412.993,00	162.523.890.048,00	(9.449.522.945,00)	94,51
1 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
1 3 1	Hibah	188.357.325.895,00	201.720.466.637,38	13.363.140.742,38	107,09
1 3 2	Dana Darurat	28.299.400.000,00	32.251.792.000,00	3.952.392.000,00	-
1 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-
1 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	117.026.683.895,00	126.437.432.637,38	9.410.748.742,38	108,04
1 3 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	42.500.000.000,00	42.500.000.000,00	-	100,00
		531.242.000,00	531.242.000,00	-	
	Jumlah Pendapatan Daerah	1.698.804.931.325,00	1.736.919.997.862,62	38.115.066.527,62	102,24
2	BELANJA DAERAH	1.795.669.529.194,00	1.652.727.843.523,91	(142.941.685.670,09)	92,04
2 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	747.082.418.932,00	699.176.722.721,00	(47.906.696.211,00)	93,59
2 1 1	Belanja Pegawai	660.805.889.712,00	635.124.320.919,00	(25.681.568.793,00)	96,11
2 1 2	Belanja Bunga	-	-	-	
2 1 3	Belanja Subsidi	-	-	-	
2 1 4	Belanja Hibah	69.020.358.500,00	53.665.425.050,00	(15.354.933.450,00)	77,75
2 1 5	Belanja Bantuan Sosial	8.801.300.000,00	7.764.735.000,00	(1.036.565.000,00)	88,22
2 1 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	-	-	-	
2 1 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik	2.328.000.498,00	2.328.000.498,00	-	100,00
2 1 8	Belanja Tidak Terduga	6.126.870.222,00	293.241.254,00	(5.833.628.968,00)	4,79
2 2	BELANJA LANGSUNG	1.048.587.110.262,00	953.552.120.802,91	(95.034.989.459,09)	90,94
2 2 1	Belanja Pegawai	133.713.028.722,00	132.107.387.708,85	(1.605.641.013,15)	98,80
2 2 2	Belanja Barang dan Jasa	541.440.849.688,00	496.351.994.037,57	(45.088.855.650,43)	91,67
2 2 3	Belanja Modal	373.433.231.852,00	325.092.739.056,49	(48.340.492.795,51)	87,06
	Jumlah Belanja Daerah	1.795.669.529.194,00	1.652.727.843.523,91	(142.941.685.670,09)	92,04
	Surplus/(Defisit)	(96.864.597.869,00)	84.192.154.338,61	181.056.752.197,61	(86,92)

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

Lampiran 13 Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Tahun 2018

04.07	04.07.01	00	00	4	1	1	01		Pajak Hotel	398.166.500.000,00	407.573.283.422,00	9.416.783.422,00	
04.07	04.07.01	00	00	4	1	1	01	02	Hotel Bintang Lima	146.000.000.000,00	149.075.884.791,00	3.075.884.791,00	UPD No 1/2011
04.07	04.07.01	00	00	4	1	1	01	03	Hotel Bintang Empat	30.000.000.000,00	32.937.867.439,00	2.937.867.439,00	UPD No 5/2018
04.07	04.07.01	00	00	4	1	1	01	04	Hotel Bintang Tiga	27.405.000.000,00	30.106.979.005,00	2.701.979.005,00	
04.07	04.07.01	00	00	4	1	1	01	05	Hotel Bintang Dua	48.255.000.000,00	47.239.517.115,00	(1.015.482.885,00)	
04.07	04.07.01	00	00	4	1	1	01	06	Hotel Bintang Satu	17.219.000.000,00	15.002.959.959,00	(2.216.040.041,00)	
04.07	04.07.01	00	00	4	1	1	01	07	Hotel Melati Tiga	8.253.000.000,00	8.227.043.812,00	(25.956.388,00)	
04.07	04.07.01	00	00	4	1	1	01	08	Hotel Melati Dua	2.645.000.000,00	3.205.409.935,00	560.409.935,00	
04.07	04.07.01	00	00	4	1	1	01	09	Hotel Melati Satu	1.640.000.000,00	1.615.704.916,00	(24.295.084,00)	
04.07	04.07.01	00	00	4	1	1	01	12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Rumah Kos	9.895.000.000,00	9.833.465.712,00	138.465.712,00	
										888.000.000,00	906.867.098,00	18.867.098,00	
04.07	04.07.01	00	00	4	1	1	02		Pajak Restoran	47.200.000.000,00	48.312.177.110,00	1.112.177.110,00	
04.07	04.07.01	00	00	4	1	1	02	01	Restoran	47.125.000.000,00	48.251.648.598,00	1.126.648.598,00	
04.07	04.07.01	00	00	4	1	1	02	02	Katering	75.000.000,00	60.530.512,00	(14.469.488,00)	
04.07	04.07.01	00	00	4	1	1	03		Pajak Hiburan	12.800.000.000,00	12.894.898.046,00	94.898.046,00	
04.07	04.07.01	00	00	4	1	1	03	01	Tontonan Film/Bioskop	4.630.000.000,00	4.817.504.621,00	187.504.621,00	
04.07	04.07.01	00	00	4	1	1	03	02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari dan/atau Busana	216.900.000,00	222.452.589,00	5.552.589,00	
04.07	04.07.01	00	00	4	1	1	03	05	Pacuan	3.850.000.000,00	3.374.818.858,00	(475.181.142,00)	
04.07	04.07.01	00	00	4	1	1	03	07	Karaoke	350.000.000,00	323.525.250,00	(26.474.750,00)	
04.07	04.07.01	00	00	4	1	1	03	10	Permainan Bilyar	50.000.000,00	54.767.400,00	4.767.400,00	
04.07	04.07.01	00	00	4	1	1	03	14	Balap Kendaraan Bermotor	4.000.000,00	6.115.000,00	2.115.000,00	
04.07	04.07.01	00	00	4	1	1	03	15	Permainan Ketangkasan	1.094.900.000,00	1.122.964.141,00	28.064.141,00	
04.07	04.07.01	00	00	4	1	1	03	17	Mandi Uap/Spa	1.118.700.000,00	1.294.575.824,00	177.875.824,00	
04.07	04.07.01	00	00	4	1	1	03	18	Pusat Kebugaran/Fitnes Centre	1.158.200.000,00	1.312.990.888,00	154.790.888,00	
04.07	04.07.01	00	00	4	1	1	03	19	Pertandingan Olah Raga	59.400.000,00	65.163.375,00	5.763.375,00	
04.07	04.07.01	00	00	4	1	1	04		Pajak Reklame	7.200.000.000,00	7.435.901.808,00	235.901.808,00	
04.07	04.07.01	00	00	4	1	1	04	01	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	6.526.150.000,00	6.764.200.448,00	238.050.448,00	
04.07	04.07.01	00	00	4	1	1	04	02	Reklame Kain	250.000.000,00	586.473.130,00	336.473.130,00	
04.07	04.07.01	00	00	4	1	1	04	03	Reklame Melekat/Stiker	50.000,00	-	(50.000,00)	
04.07	04.07.01	00	00	4	1	1	04	05	Reklame Berjalan	20.000.000,00	17.620.764,00	(2.379.236,00)	
04.07	04.07.01	00	00	4	1	1	04	06	Reklame Udara	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	
04.07	04.07.01	00	00	4	1	1	04	11	Reklame Balho	100.000,00	277.200,00	177.200,00	
04.07	04.07.01	00	00	4	1	1	04	12	Reklame Cahaya	403.700.000,00	67.330.263,00	(335.369.737,00)	
04.07	04.07.01	00	00	4	1	1	05		Pajak Penerangan Jalan	48.500.000.000,00	49.514.221.949,00	1.014.221.949,00	
04.07	04.07.01	00	00	4	1	1	05	01	Pajak Penerangan Jalan PLN	48.500.000.000,00	49.514.221.949,00	1.014.221.949,00	
04.07	04.07.01	00	00	4	1	1	07		Pajak Parkir	3.500.000.000,00	3.525.732.992,00	25.732.992,00	
04.07	04.07.01	00	00	4	1	1	07	01	Pajak Parkir	3.500.000.000,00	3.525.732.992,00	25.732.992,00	
04.07	04.07.01	00	00	4	1	1	08		Pajak Air Tanah	2.250.000.000,00	2.277.618.512,00	27.618.512,00	
04.07	04.07.01	00	00	4	1	1	08	01	Pajak Air Tanah	2.250.000.000,00	2.277.618.512,00	27.618.512,00	
04.07	04.07.01	00	00	4	1	1	09		Pajak Sarang Burung Walet	6.500.000,00	6.575.000,00	75.000,00	
04.07	04.07.01	00	00	4	1	1	09	01	Pajak Sarang Burung Walet	6.500.000,00	6.575.000,00	75.000,00	
04.07	04.07.01	00	00	4	1	1	12		Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	75.000.000.000,00	76.403.636.198,00	1.403.636.198,00	
04.07	04.07.01	00	00	4	1	1	12	01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	75.000.000.000,00	76.403.636.198,00	1.403.636.198,00	UPD No 2/2011
04.07	04.07.01	00	00	4	1	1	13		Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	56.000.000.000,00	58.425.877.019,00	2.425.877.019,00	
04.07	04.07.01	00	00	4	1	1	13	01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	56.000.000.000,00	58.425.877.019,00	2.425.877.019,00	UPD No 6/2018

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA
PERPUSTAKAAN

Lampiran 14 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019
(AUDITED)

Halaman 1
(format APBD)

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1.754.768.489.387,00	1.765.760.418.492,27	10.991.929.105,27	100,63
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	653.011.939.630,00	689.049.725.509,27	36.037.785.879,27	105,52
4 1 1	Pajak Daerah	425 381.500.000,00	451.265.948.031,00	25.884.448.031,00	106,08
4 1 2	Retribusi Daerah	33 451.735.712,00	32.428.343.731,00	(1.023.391.981,00)	96,94
4 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	28 935.929.644,00	28.975.003.950,01	39.074.306,01	100,14
4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	165 242.774.274,00	176.380.429.797,26	11.137.655.523,26	106,74
4 2	DANA PERIMBANGAN	916.460.511.482,00	875.308.177.702,00	(41.152.333.780,00)	95,51
4 2 1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	46 213.757.482,00	28.975.322.400,00	(17.238.435.082,00)	62,70
4 2 2	Dana Alokasi Umum	699 176.894.000,00	700.372.564.000,00	1.195.670.000,00	100,17
4 2 3	Dana Alokasi Khusus	171.069.860.000,00	145.960.291.302,00	(25.109.568.698,00)	85,32
4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	185.296.038.275,00	201.402.515.281,00	16.106.477.006,00	108,69
4 3 1	Hibah	30.078.600.000,00	31.011.780.000,00	933.180.000,00	-
4 3 2	Dana Darurat	-	-	-	-
4 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	118.220.579.275,00	133.393.876.281,00	15.173.297.006,00	112,83
4 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	35.760.859.000,00	35.760.859.000,00	-	100,00
4 3 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1.236.000.000,00	1.236.000.000,00	-	
	Jumlah Pendapatan Daerah	1.754.768.489.387,00	1.765.760.418.492,27	10.991.929.105,27	100,63
5	BELANJA DAERAH	1.943.940.157.146,52	1.734.593.335.861,34	(209.346.821.285,18)	89,23
5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	775.963.952.168,52	716.969.657.199,00	(58.994.294.969,52)	92,40
5 1 1	Belanja Pegawai	667.465.772.253,00	623.730.246.194,00	(43.735.526.059,00)	93,45
5 1 2	Belanja Bunga	-	-	-	
5 1 3	Belanja Subsidi	-	-	-	
5 1 4	Belanja Hibah	85.740.983.138,00	79.389.047.945,00	(6.351.935.193,00)	92,59
5 1 5	Belanja Bantuan Sosial	12.526.580.000,00	11.551.423.000,00	(975.157.000,00)	92,22
5 1 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	-	-	-	
5 1 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik	2.002.804.587,00	1 981.246.996,00	(21.557.591,00)	98,92
5 1 8	Belanja Tidak Terduga	8.227.812.190,52	317.693.064,00	(7.910.119.126,52)	3,86
5 2	BELANJA LANGSUNG	1.167.976.204.978,00	1.017.623.678.662,34	(150.352.526.315,66)	87,13
5 2 1	Belanja Pegawai	163.392.184.600,00	136 801.816.234,28	(26.590.368.365,72)	83,73
5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	617.496.329.981,00	553 387.490.228,89	(64.108.839.752,11)	89,62
5 2 3	Belanja Modal	387.087.690.397,00	327 434.372.199,17	(59.653.318.197,83)	84,59
	Jumlah Belanja Daerah	1.943.940.157.146,52	1.734.593.335.861,34	(209.346.821.285,18)	89,23
	Surplus/(Defisit)	(189.171.667.759,52)	31.167.082.630,93	220.338.750.390,45	(16,48)

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

Lampiran 15 Realisasi Penerimaan Pajak Parkir 2019

4.07	04.07.01	00	00	4	1	1		Hasil Pajak Daerah	425.391.000.000,00	451.205.948.031,00	26.864.448.031,00	
4.07	04.07.01	00	00	4	1	1	01	Pajak Hotel	152.000.000.000,00	161.257.192.790,00	9.257.192.790,00	
4.07	04.07.01	00	00	4	1	1	01	02	Hotel Bintang Lima	29.500.000.000,00	41.456.593.174,00	11.956.593.174,00	
4.07	04.07.01	00	00	4	1	1	01	03	Hotel Bintang Empat	25.300.000.000,00	35.355.926.399,00	10.055.926.399,00	
4.07	04.07.01	00	00	4	1	1	01	04	Hotel Bintang Tiga	42.300.000.000,00	43.044.652.512,00	744.652.512,00	
4.07	04.07.01	00	00	4	1	1	01	05	Hotel Bintang Dua	29.500.000.000,00	16.438.946.977,00	(12.561.053.023,00)	
4.07	04.07.01	00	00	4	1	1	01	06	Hotel Bintang Satu	13.500.000.000,00	8.530.782.478,00	(4.969.217.522,00)	
4.07	04.07.01	00	00	4	1	1	01	07	Hotel Melati Tiga	2.300.000.000,00	2.917.881.469,00	617.881.469,00	
4.07	04.07.01	00	00	4	1	1	01	08	Hotel Melati Dua	1.800.000.000,00	1.692.529.002,00	(107.470.998,00)	
4.07	04.07.01	00	00	4	1	1	01	09	Hotel Melati Satu	6.800.000.000,00	9.646.653.426,00	3.046.653.426,00	
4.07	04.07.01	00	00	4	1	1	01	12	Losmen/Rumah Penginapan/Perenggrahan/Rumah Kos	700.000.000,00	1.213.345.333,00	513.345.333,00	
4.07	04.07.01	00	00	4	1	1	02	Pajak Restoran	53.000.000.000,00	63.237.228.654,00	10.237.228.654,00	
4.07	04.07.01	00	00	4	1	1	02	01	Restoran	52.950.000.000,00	63.184.465.780,00	10.214.465.780,00	
4.07	04.07.01	00	00	4	1	1	02	03	Katering	50.000.000,00	52.762.874,00	22.762.874,00	
4.07	04.07.01	00	00	4	1	1	03	Pajak Hiburan	12.500.000.000,00	12.702.230.089,00	202.230.089,00	
4.07	04.07.01	00	00	4	1	1	03	01	Tontonan Film/Bioskop	4.300.000.000,00	4.934.475.189,00	634.475.189,00	
4.07	04.07.01	00	00	4	1	1	03	02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari dan/atau Busana	180.000.000,00	188.872.200,00	8.872.200,00	
4.07	04.07.01	00	00	4	1	1	03	05	Pameran	4.000.000.000,00	3.096.930.300,00	(903.069.800,00)	
4.07	04.07.01	00	00	4	1	1	03	07	Karaoke	450.000.000,00	381.933.891,00	(68.066.109,00)	
4.07	04.07.01	00	00	4	1	1	03	08	Permainan Bilyar dan Bowling	50.000.000,00	55.237.496,00	5.292.496,00	
4.07	04.07.01	00	00	4	1	1	03	10	Pacuan kuda dan Balap Kendaraan Bermotor	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)
4.07	04.07.01	00	00	4	1	1	03	11	Permainan Ketangkasan	1.100.000.000,00	941.978.826,30	(158.021.174,00)
4.07	04.07.01	00	00	4	1	1	03	12	Panti Pijat Massage, Refleksi dan Mandi Uap/Spa	1.100.000.000,00	1.000.032.933,00	200.032.933,00
4.07	04.07.01	00	00	4	1	1	03	13	Pertandingan Olah Raga	60.000.000,00	324.008.073,00	264.008.073,00
4.07	04.07.01	00	00	4	1	1	03	14	Pusat Kebugaran/Fitnes Centre	1.200.000.000,00	1.270.711.292,00	70.711.292,00
4.07	04.07.01	00	00	4	1	1	04	Pajak Reklame	7.200.000.000,00	7.449.951.971,00	249.951.971,00
4.07	04.07.01	00	00	4	1	1	04	01	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	5.673.950.000,00	5.619.927.969,00	(54.022.031,00)
4.07	04.07.01	00	00	4	1	1	04	02	Reklame Kain	250.000.000,00	689.606.416,00	439.606.416,00
4.07	04.07.01	00	00	4	1	1	04	03	Reklame Melekat/Stiker	50.000,00	-	(50.000,00)
4.07	04.07.01	00	00	4	1	1	04	05	Reklame Berjalan	50.000.000,00	110.880.462,00	60.880.462,00
4.07	04.07.01	00	00	4	1	1	04	06	Reklame Udara	5.000.000,00	1.743.750,00	(3.256.250,00)
4.07	04.07.01	00	00	4	1	1	04	11	Reklame Balho	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)
4.07	04.07.01	00	00	4	1	1	04	12	Reklame Cahaya	220.000.000,00	27.793.974,00	192.206.026,00
4.07	04.07.01	00	00	4	1	1	05	Pajak Penerangan Jalan	51.000.000.000,00	52.374.696.494,00	1.374.696.494,00
4.07	04.07.01	00	00	4	1	1	05	01	Pajak Penerangan Jalan PLN	51.000.000.000,00	52.374.696.494,00	1.374.696.494,00
4.07	04.07.01	00	00	4	1	1	07	Pajak Parkir	3.675.000.000,00	3.050.479.181,00	(624.520.819,00)
4.07	04.07.01	00	00	4	1	1	07	01	Pajak Parkir	3.675.000.000,00	3.050.479.181,00	(624.520.819,00)
4.07	04.07.01	00	00	4	1	1	08	Pajak Air Tanah	2.500.000.000,00	2.546.299.969,00	46.299.969,00
4.07	04.07.01	00	00	4	1	1	08	01	Pajak Air Tanah	2.500.000.000,00	2.546.299.969,00	46.299.969,00
4.07	04.07.01	00	00	4	1	1	09	Pajak Sarang Burung Walet	6.500.000,00	6.650.000,00	150.000,00
4.07	04.07.01	00	00	4	1	1	09	01	Pajak Sarang Burung Walet	6.500.000,00	6.650.000,00	150.000,00
4.07	04.07.01	00	00	4	1	1	12	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	82.500.000.000,00	86.550.328.189,00	4.050.328.189,00	
4.07	04.07.01	00	00	4	1	1	12	01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	82.500.000.000,00	86.550.328.189,00	4.050.328.189,00
4.07	04.07.01	00	00	4	1	1	13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	61.000.000.000,00	62.050.890.703,00	1.050.890.703,00	
4.07	04.07.01	00	00	4	1	1	13	01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	61.000.000.000,00	62.050.890.703,00	1.050.890.703,00

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

Lampiran 16 Realisasi Pendapatan Asli Daerah 2020

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : TAHUN 2021
TENTANG :
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020
(AUDITED)

Halaman 1
(format APBD)

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN DAERAH	1.636.876.158.348,64	1.699.751.020.194,30	62.874.861.845,66	103,84
1 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	476.918.678.411,89	563.174.371.396,88	86.255.692.984,99	118,09
1 1 1	Pajak Daerah	282.870.500.000,00	342.780.587.013,00	59.910.087.013,00	121,18
1 1 2	Retribusi Daerah	19.646.771.359,00	23.310.646.522,00	3.663.875.163,00	118,65
1 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	34.829.668.592,00	34.859.626.690,98	30.958.006,98	100,09
1 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	139.572.738.360,89	162.223.511.162,90	22.650.772.802,01	116,23
1 2	DANA PERIMBANGAN	840.241.969.249,00	818.760.445.269,00	(21.481.524.080,00)	97,44
1 2 1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	53.509.342.577,00	48.878.978.276,00	(4.630.364.301,00)	91,35
1 2 2	Dana Alokasi Umum	631.629.948.000,00	627.247.170.000,00	(4.392.778.000,00)	99,30
1 2 3	Dana Alokasi Khusus	155.092.678.672,00	142.634.296.993,00	(12.458.381.779,00)	91,97
1 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	319.715.510.587,75	317.816.203.528,42	(1.899.307.059,33)	99,41
1 3 1	Hibah	62.517.650.000,00	59.813.911.135,00	(2.703.738.865,00)	-
1 3 2	Dana Darurat	-	-	-	-
1 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	119.363.884.803,75	120.965.338.876,00	1.601.454.072,25	101,34
1 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	83.457.615.000,00	83.457.615.000,00	-	100,00
1 3 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	54.376.360.784,00	53.579.338.517,42	(797.022.266,58)	
	Jumlah Pendapatan Daerah	1.636.876.158.348,64	1.699.751.020.194,30	62.874.861.845,66	103,84
2	BELANJA DAERAH	1.837.219.591.471,09	1.517.599.468.488,39	(319.620.122.982,70)	82,60
2 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	967.028.159.996,09	739.999.064.237,58	(227.029.095.758,51)	76,52
2 1 1	Belanja Pegawai	640.994.760.065,00	600.497.942.504,00	(40.496.817.561,00)	93,68
2 1 2	Belanja Bunga	-	-	-	
2 1 3	Belanja Subsidi	-	-	-	
2 1 4	Belanja Hibah	50.123.433.400,00	38.725.063.808,00	(11.398.369.592,00)	77,26
2 1 5	Belanja Bantuan Sosial	32.131.455.000,00	25.029.937.400,00	(7.101.527.600,00)	77,90
2 1 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	-	-	-	
2 1 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik	1.360.789.078,00	1.360.789.078,00	-	100,00
2 1 8	Belanja Tidak Terduga	242.412.712.453,09	74.385.331.447,58	(168.032.381.005,51)	30,68
2 2	BELANJA LANGSUNG	870.191.431.475,00	777.600.404.250,81	(92.591.027.224,19)	89,36
2 2 1	Belanja Pegawai	134.032.306.111,00	128.212.237.274,78	(5.820.068.836,22)	95,66
2 2 2	Belanja Barang dan Jasa	523.189.536.797,00	455.864.521.552,10	(67.325.015.244,90)	87,13
2 2 3	Belanja Modal	212.969.588.567,00	193.523.645.423,93	(19.445.943.143,07)	90,87
	Jumlah Belanja Daerah	1.837.219.591.471,09	1.517.599.468.488,39	(319.620.122.982,70)	82,60
	Surplus/(Defisit)	(200.343.433.122,45)	182.151.551.705,91	382.494.984.828,36	(90,92)

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

Lampiran 17 Realisasi Peneriman Pajak Parkir Tahun 2020

04.07.04.07.01.00.00.4.1.1.01	Hasil Pajak Daerah Pajak Hotel	232.870.900.000,00	342.780.587.013,00	59.910.087.013,00	
04.07.04.07.01.00.00.4.1.1.01.02	Hotel Bintang Lima	63.000.000.000,00	78.279.066.037,00	15.279.066.037,00	1)PD No 1/2017
04.07.04.07.01.00.00.4.1.1.01.03	Hotel Bintang Empat	13.480.000.000,00	18.691.651.432,00	5.211.651.432,00	2)PD No 5/2018
04.07.04.07.01.00.00.4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	17.700.000.000,00	24.790.772.905,00	7.090.772.905,00	
04.07.04.07.01.00.00.4.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua	17.300.000.000,00	20.236.266.001,00	2.936.266.001,00	
04.07.04.07.01.00.00.4.1.1.01.06	Hotel Bintang Satu	5.970.000.000,00	6.104.786.668,00	134.786.668,00	
04.07.04.07.01.00.00.4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	2.250.000.000,00	2.171.035.455,00	(78.964.545,00)	
04.07.04.07.01.00.00.4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	1.040.000.000,00	1.021.115.187,00	(18.884.813,00)	
04.07.04.07.01.00.00.4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	860.000.000,00	625.387.197,00	(234.612.803,00)	
04.07.04.07.01.00.00.4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/Perusanggrahan/Rumah Kos	3.650.000.000,00	3.791.152.932,00	141.152.932,00	
		750.000.000,00	846.898.360,00	96.898.360,00	
04.07.04.07.01.00.00.4.1.1.02	Pajak Restoran	38.015.000.000,00	43.521.758.533,00	5.506.758.533,00	
04.07.04.07.01.00.00.4.1.1.02.01	Restoran	38.000.000.000,00	43.502.504.068,00	5.502.504.068,00	
04.07.04.07.01.00.00.4.1.1.02.02	Katering	15.000.000,00	19.254.465,00	4.254.465,00	
04.07.04.07.01.00.00.4.1.1.03	Pajak Hiburan	3.450.000.000,00	3.870.424.584,00	420.424.584,00	
04.07.04.07.01.00.00.4.1.1.03.01	Tontonan Film/Bioskop	900.556.000,00	932.733.067,00	32.177.067,00	
04.07.04.07.01.00.00.4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian non Tradisional Musik/Tari Sinkratau Busana	33.415.000,00	93.075.400,00	60.660.400,00	
				-	
				-	
04.07.04.07.01.00.00.4.1.1.03.05	Pameran	790.000.000,00	867.538.638,00	77.538.638,00	
04.07.04.07.01.00.00.4.1.1.03.07	Karaoke	140.000.000,00	150.848.363,00	10.848.363,00	
04.07.04.07.01.00.00.4.1.1.03.09	Permainan Bilyar dan Bowling	26.037.000,00	27.985.311,00	1.948.311,00	
04.07.04.07.01.00.00.4.1.1.03.10	Pacuan kuda dan Balap Kendaraan Bermotor	-		-	
				-	
04.07.04.07.01.00.00.4.1.1.03.11	Permainan Ketangkasan	295.055.000,00	306.585.132,00	11.530.132,00	
04.07.04.07.01.00.00.4.1.1.03.12	Panti Pijat Massage, Refleksi dan Mandi Uap/Spa	450.000.000,00	511.268.268,00	61.268.268,00	
				-	
04.07.04.07.01.00.00.4.1.1.03.13	Pertandingan Olah Raga	13.937.000,00	13.937.875,00	875,00	
04.07.04.07.01.00.00.4.1.1.03.14	Pusat Kebugaran/Fitnes Centre	712.000.000,00	876.452.530,00	164.452.530,00	
04.07.04.07.01.00.00.4.1.1.04	Pajak Reklame	5.000.000.000,00	6.156.071.238,00	1.156.071.238,00	
04.07.04.07.01.00.00.4.1.1.04.01	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	4.690.000.000,00	5.706.164.497,00	1.016.164.497,00	
04.07.04.07.01.00.00.4.1.1.04.02	Reklame Kain	284.458.000,00	415.789.476,00	131.331.476,00	
04.07.04.07.01.00.00.4.1.1.04.03	Reklame Melekat/Stiker	-	-	-	
04.07.04.07.01.00.00.4.1.1.04.05	Reklame Berjalan	25.542.000,00	34.117.285,00	8.575.285,00	
04.07.04.07.01.00.00.4.1.1.04.06	Reklame Udara	-	-	-	
04.07.04.07.01.00.00.4.1.1.04.11	Reklame Balon	-	-	-	
04.07.04.07.01.00.00.4.1.1.04.12	Reklame Cahaya/Film/Slide	-	-	-	
04.07.04.07.01.00.00.4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	45.000.000.000,00	47.421.117.139,00	2.421.117.139,00	
04.07.04.07.01.00.00.4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan PLN	45.000.000.000,00	47.421.117.139,00	2.421.117.139,00	
04.07.04.07.01.00.00.4.1.1.07	Pajak Parkir	1.600.000.000,00	1.851.049.591,00	251.049.591,00	
04.07.04.07.01.00.00.4.1.1.07.01	Pajak Parkir	1.600.000.000,00	1.851.049.591,00	251.049.591,00	
04.07.04.07.01.00.00.4.1.1.08	Pajak Air Tanah	1.300.000.000,00	1.575.287.372,00	275.287.372,00	
04.07.04.07.01.00.00.4.1.1.08.01	Pajak Air Tanah	1.300.000.000,00	1.575.287.372,00	275.287.372,00	
04.07.04.07.01.00.00.4.1.1.09	Pajak Sarang Burung Walet	5.500.000,00	5.600.000,00	100.000,00	
04.07.04.07.01.00.00.4.1.1.09.01	Pajak Sarang Burung Walet	5.500.000,00	5.600.000,00	100.000,00	
04.07.04.07.01.00.00.4.1.1.12	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	82.500.000.000,00	96.517.233.954,00	14.017.233.954,00	3)PD No 2/201
04.07.04.07.01.00.00.4.1.1.12.01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	82.500.000.000,00	96.517.233.954,00	14.017.233.954,00	
04.07.04.07.01.00.00.4.1.1.13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	43.000.000.000,00	63.582.978.565,00	20.582.978.565,00	4)PD No 8/201
04.07.04.07.01.00.00.4.1.1.13.01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	43.000.000.000,00	63.582.978.565,00	20.582.978.565,00	

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

Lampiran 18 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 dan 2020
(AUDITED)

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Reff	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	PENDAPATAN DAERAH	5.1.1.				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.1.				
3	Pajak Daerah	5.1.1.1.a.	324.206.500.000,00	372.462.884.357,00	114,88	342.780.587.013,00
4	Retribusi Daerah	5.1.1.1.b.	22.784.158.635,00	26.855.366.529,00	117,87	23.310.646.522,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.c.	23.335.909.301,00	23.991.239.142,05	102,81	34.859.626.698,98
6	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.d.	144.680.789.236,00	174.812.395.309,82	120,83	162.223.511.162,90
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		515.007.357.172,00	598.121.885.337,87	116,14	563.174.371.396,88
8	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2.				
9	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	5.1.1.2.a.				
0	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	5.1.1.2.a.1)	52.139.527.722,00	62.643.616.366,00	120,15	48.878.978.276,00
1	Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.a.1)a.	-	-	-	47.145.298.917,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	5.1.1.2.a.1)b.	-	-	-	1.733.679.359,00
3	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.2.a.2)	617.524.294.000,00	617.524.294.000,00	100,00	627.247.170.000,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	5.1.1.2.a.3)	42.690.294.000,00	36.468.809.740,00	85,43	42.628.557.012,00
5	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	5.1.1.2.a.4)	106.788.611.000,00	95.522.494.831,00	89,45	100.005.739.981,00
6	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		819.142.726.722,00	812.159.214.937,00	99,15	818.760.445.269,00
7	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	5.1.1.2.b.				
8	Dana Insentif Daerah (DID)	5.1.1.2.b.1)	72.692.053.000,00	72.692.053.000,00	100,00	-
9	Dana Penyesuaian	5.1.1.2.b.2)	-	-	-	112.688.603.600,00
0	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		72.692.053.000,00	72.692.053.000,00	100,00	112.688.603.600,00
1	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	5.1.1.2.c.				
2	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.c.1)	-	-	-	120.965.338.876,00
1	Bantuan Keuangan	5.1.1.2.c.2)	193.913.827.012,00	193.807.992.150,59	99,95	-
1	Pendapatan Lainnya	5.1.1.2.c.3)		-		53.579.338.517,42
1	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		193.913.827.012,00	193.807.992.150,59	99,95	174.544.677.393,42
1	Total Pendapatan Transfer		1.085.748.606.734,00	1.078.659.260.087,59	99,35	1.105.993.726.262,42
1	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3.				
1	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.a.	288.000.000,00	298.000.000,00	103,47	30.582.922.535,00
1	Dana Darurat	5.1.1.3.b.	-	-	-	-
1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.1.3.c.	30.348.030.000,00	30.194.141.917,00	99,49	-
1	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		30.636.030.000,00	30.492.141.917,00	99,53	30.582.922.535,00
1	JUMLAH PENDAPATAN		1.631.391.993.906,00	1.707.273.287.342,46	104,65	1.699.751.020.194,20
	BELANJA DAERAH	5.1.2.				
	BELANJA OPERASI	5.1.2.1.				
	Belanja Pegawai	5.1.2.1.a.	768.350.167.390,00	693.434.145.524,00	90,25	728.710.179.778,78
	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.b.	755.028.166.220,00	675.659.110.064,00	89,49	455.864.521.552,10
	Belanja Bunga	5.1.2.1.c.	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	5.1.2.1.d.	-	-	-	-
	Belanja Hibah	5.1.2.1.e.	47.899.637.618,00	44.321.476.345,00	92,53	38.725.063.808,00
	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.f.	41.136.995.000,00	32.136.344.500,00	78,12	25.029.937.400,00
	Jumlah Belanja Operasi		1.612.414.966.228,00	1.445.551.076.433,00	89,65	1.248.329.702.538,88
	BELANJA MODAL	5.1.2.2.				
	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.a.	38.707.881.000,00	31.234.102.680,00	80,69	17.920.111.920,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.b.	72.102.094.459,00	57.237.140.569,53	79,38	54.368.762.898,42
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.c.	59.683.311.131,00	52.693.245.460,22	88,29	41.131.637.105,54
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.1.2.2.d.	91.647.548.594,00	84.799.299.230,30	92,53	70.226.071.861,47
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.e.	15.568.958.878,00	14.043.783.495,88	90,20	3.834.203.993,50
	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.f.	-	-	-	6.042.857.645,00
	Jumlah Belanja Modal		277.709.794.062,00	240.007.571.435,93	86,42	193.523.645.423,93

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

Lampiran 19 Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Tahun 2021

Halaman 1

KODE REKENING	URAIAN PENDAPATAN	ANGGARAN Rp	REALISASI Rp	Bertambah/Berkurang Rp	Dasar Hukum
4.1.01.09	**Pajak Reklame**	6.300.000.000,00	7.293.470.187,00	993.470.187,00	
4.1.01.09.01.0001.	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	5.491.500.000,00	7.263.793.152,00	1.772.293.152,00	- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011
4.1.01.09.02.0001.	Pajak Reklame Kain	787.500.000,00	27.348.288,00	(760.151.712,00)	tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)
4.1.01.09.05.0001.	Pajak Reklame Berjalan	21.000.000,00	2.329.157,00	(18.670.843,00)	- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5)
4.1.01.10	**Pajak Penerangan Jalan**	45.300.000.000,00	45.101.915.431,00	(198.084.569,00)	
4.1.01.10.01.0001.	Pajak Penerangan Jalan PLN	45.300.000.000,00	45.101.915.431,00	(198.084.569,00)	- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5)
4.1.01.11	**Pajak Parkir**	2.000.000.000,00	2.034.806.805,00	34.806.805,00	
4.1.01.11.01.0001.	Pajak Parkir	2.000.000.000,00	2.034.806.805,00	34.806.805,00	- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5)
4.1.01.12	**Pajak Air Tanah**	2.300.000.000,00	2.815.195.871,00	515.195.871,00	
4.1.01.12.01.0001.	Pajak Air Tanah	2.300.000.000,00	2.815.195.871,00	515.195.871,00	- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5)
4.1.01.13	**Pajak Sarang Burung Walet**	6.500.000,00	6.700.000,00	200.000,00	
4.1.01.13.01.0001.	Pajak Sarang Burung Walet	6.500.000,00	6.700.000,00	200.000,00	- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5)
4.1.01.15	**Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)**	92.500.000.000,00	97.678.727.427,00	5.178.727.427,00	
4.1.01.15.01.0001.	Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	92.500.000.000,00	97.678.727.427,00	5.178.727.427,00	- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2)

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

Lampiran 20 Lembar Bimbingan Dosen

YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA
FAKULTAS EKONOMI DAN SOSIAL
Jl. Siliwangi, Ring Road Barat, Gamping, Yogyakarta 55293
Telp. (0274) 552489, 552851 Fax. (0274) 557228 Website: www.unjaya.ac.id E-mail: info@unjaya.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NIM : 18239019
NAMA MAHASISWA : MUHAMMAD CHOIRUL ANAM.
NO. HP MAHASISWA : 081392769117.
PEMBIMBING SKRIPSI : David Sulistiyantoro, S.E., M.Acc., Ak., CA.
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA.

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Dosen
1	18 Maret	Penggantian Judul & Objek	
2		Penelitian.	
3	31 Maret	Revisi bab 1-3.	
4	14 April	Revisi bab 1-3	
5	26 April	Revisi Metode Penelitian.	
6	12 Mei	Revisi Penulisan.	
7	13 Mei	Persetujuan Proposal.	
8	20 Juni	Revisi bab 1-5	
9	27 Juni	Revisi bab 1-5.	
10	1 Juli	Revisi bab 1-5.	
11	8 Juli	Revisi Penulisan bab 1-5.	
12	19 Juli	Persetujuan Naskah Skripsi	
13			
14			

Ttd Dosen Pembimbing

David Sulistiyantoro

Ttd Mahasiswa

(M. Choirul Anam.)

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN